



LKJIP

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SAMARINDA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024



LKJIP

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SAMARINDA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024



dishub.samarindakota.go.id



dishub@samarindakota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 ini. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan publik.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Perhubungan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP 2024 ini bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel mengenai kinerja instansi kami selama tahun anggaran yang telah berlalu. Dalam laporan ini, kami menyajikan berbagai data dan analisis yang mencerminkan pencapaian, tantangan, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Perhubungan. Kinerja Dinas Perhubungan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama semua pihak, baik dari internal instansi maupun eksternal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKJIP ini.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi alat evaluasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja instansi di masa yang akan datang, serta sebagai acuan bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akhir kata, kami berharap LKJIP 2024 ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Samarinda, 24 Februari 2025
Kepala Dinas Perhubungan



HMT. MANALU, S.SiT, M.Sc
NIP. 19770328 200012 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang terbentuk berdasarkan Perda Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2001, merupakan salah satu instansi teknis dimana dalam melaksanakan tugasnya langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga kinerja dan pelayanannya dapat langsung dirasakan oleh segala lapisan masyarakat.

Tahun 2021, Dinas Perhubungan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis (Renstra) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Periode Lima Tahun. Renstra Dinas Perhubungan merupakan manifestasi komitmen Dinas Perhubungan dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026.

Secara umum dalam tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah mencapai target kinerja melalui 2 (dua) Tujuan dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan 2 (Dua) Sasaran dengan 2 (dua) indikator Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana kinerja tahun 2024 dan dokumen perjanjian kinerja yang ingin dicapai, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Indikator kinerja pada pencapaian Tujuan 1 meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota dengan capaian kinerja sebesar 100,12%.
- Indikator kinerja pada pencapaian Tujuan 2 Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 68,72%.
- Indikator kinerja pada sasaran 1 Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perhubungan dengan capaian kinerja sebesar 102,08%
- Indikator kinerja pada Sasaran 2 Meningkatnya kinerja dan pelayanan perangkat daerah dengan capaian kinerja sebesar 99,24%.

Untuk mencapai target kinerja tersebut telah dilakukan berbagai upaya berupa penguatan reformasi birokrasi internal, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta upaya koordinasi peningkatan kerjasama dengan instansi terkait.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2024 juga didukung oleh anggaran dengan alokasi **Rp. 107.449.873.554** dengan realisasi sebesar **Rp. 105.732.119.183** atau dengan capaian **98,40%**.

Dengan demikian, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik, serta menjadikan laporan ini sebagai acuan untuk perbaikan yang berkelanjutan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB.I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1. Tugas Pokok.....	4
2. Fungsi.....	4
3. Struktur Organisasi	12
D. Sumber Daya	14
E. Isu-Isu Strategis	19
F. Sistematika Penulisan.	20
BAB.II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis	22
1. Visi dan Misi Kepala Daerah	23
2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan	24
B. Strategi dan Arah Kebijakan	25
1. Strategi	25
2. Arah Kebijakan.....	27
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	28
D. Perjanjian Kinerja	29
BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA.....	47
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	47
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	48
1.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Tujuan	48
1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran.....	59

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun yang Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	66
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	67
4. Realisasi Kinerja Mengacu pada Standar Nasional/ Lainnya	68
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.....	68
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	69
6.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia	69
6.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran	70
7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	71
B. Realisasi Anggaran Tahun 2024	79
BAB.IV PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2021-2024	14
Tabel 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2021 – 2024.....	14
Tabel 3. Pegawai Tidak Tetap Harian / Pegawai Tidak Tetap Bulanan Tahun 2021 – 2024	15
Tabel 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2021 – 2024	16
Tabel 5. Aset Dinas Perhubungan Kota Samarinda Per 31 Desember Tahun 2022 – 2024	17
Tabel 6. Data Sarana Operasional Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2021 – 2024	18
Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2021-2026.....	25
Tabel 8. Rencana Strategis Periode Tahun 2021-2026 Dinas Perhubungan Kota Samarinda	26
Tabel 9. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2016 untuk Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Tabel T-C.26, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	27
Tabel 10. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Samarinda	28
Tabel 11. Perjanjian Kinerja 2024.....	29
Tabel 12. Pagu Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja sampai dengan APBD-P Tahun Anggaran 2024	30
Tabel 13. Rincian Indikator Program.....	30
Tabel 14. Keterkaitan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	31
Tabel 15. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	42
Tabel 16. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis	46
Tabel 17. Skala Nilai Peringkat Kinerja	48
Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024	49
Tabel 19. Rincian Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Samarinda.....	50
Tabel 20. Rincian Kinerja Indikator Tujuan Tahun 2024	55
Tabel 21. Hasil Analisis SKM UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	58
Tabel 22. Rincian Kinerja Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	60
Tabel 23. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2024	61
Tabel 24. Rincian Pencapaian Indikator Program Tahun 2024.....	63

Tabel 25. Hasil Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	64
Tabel 26. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Tahun Terakhir	66
Tabel 27. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	67
Tabel 28. Realisasi Kinerja Mengacu Pada Standar Nasional/Lainnya	64
Tabel 29. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	68
Tabel 30. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Menurut Umur dan Jenis Kelamin	70
Tabel 31. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	71
Tabel 32. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	73
Tabel 33. Realisasi Anggaran Berdasarkan DPA-P Tahun 2024	79

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
3. Renstra Kementerian Tahun 2020-2024
4. Tabel Kinerja Jalan
5. Evaluasi Renja



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas pemerintah dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan komponen yang sangat penting karena menyangkut pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas atas penggunaan anggaran. Pertanggungjawaban di instansi pusat maupun daerah harusnya menyusun dan mempublikasi LKjIP sebagai wujud tanggung jawab dan akuntabilitasnya.

Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tersebut kemudian diterapkan melalui pembuatan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dokumen yang menyajikan data dan informasi mengenai hasil kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai bentuk dari pertanggungjawaban institusional Organisasi Perangkat Daerah (OPD). LKjIP dipergunakan sebagai bahan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan juga digunakan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan dan kinerja tahun-tahun berikutnya.

LKjIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan pendorong terwujudnya *Good Governance*. LKjIP bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi manfaat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sebagaimana ***Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014*** Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ***Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014*** Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Terbentuknya Dinas Perhubungan Kota Samarinda, mengalami beberapa tahap yang disebabkan terjadinya pemekaran daerah, pada tahun 1975 dibentuk instansi pemerintahan yang mengurus Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disebut DLLAJ. DLLAJ mempunyai wilayah kerja setingkat Provinsi disebut Kantor Inspeksi LLAJ Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan untuk wilayah Kota Samarinda yang mengurus bidang tersebut adalah DLLAJ Kotamadya Samarinda.

Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang terbentuk berdasarkan Perda Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2001, merupakan salah satu instansi teknis dimana dalam melaksanakan tugasnya langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga kinerja dan pelayanannya dapat langsung dirasakan oleh segala lapisan masyarakat.

Serangkaian upaya peningkatan kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan selama ini, baik peningkatan kerja yang bersifat fisik maupun peningkatan kinerja pelayanan non fisik telah diupayakan dengan optimal.

Dinas Perhubungan bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan teknis di bidang perhubungan, termasuk rencana strategis dan rencana kerja. Ini mencakup pengembangan sistem transportasi yang efisien dan aman, serta penyusunan pedoman dan standar teknis untuk pelaksanaan urusan perhubungan.

Dinas Perhubungan juga memiliki tanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas, merencanakan dan melaksanakan manajemen lalu lintas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan berkendara. Upaya ini termasuk penyediaan perlengkapan jalan dan peningkatan pelaksanaan uji kelaikan kendaraan. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Samarinda antara lain berupa pembinaan terhadap juru parkir, penataan dan pengaturan kawasan parkir, penyuluhan dan sosialisasi berbagai peraturan dan kebijakan berlalu lintas, penyuluhan keselamatan pelayaran bagi para nahkoda kapal serta pengawasan/penertiban terhadap kapal-kapal sungai.

B. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda tahun 2023 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :



1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 – 2026 tentang AKIP;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026;
8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda
9. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 060.01/482/HK- KS/XII/2021 Tentang Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026.
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026.
12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026.
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tanggal 29 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023;



14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023;
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 72 Tahun 2023 tanggal tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Samarinda Tahun 2023.

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. TUGAS POKOK

1. Dinas perhubungan Kota Samarinda mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di bidang “Perhubungan” yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan Tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang di tetapkan Pemerintah Kota.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang di tetapkan Pemerintah Kota.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang di tetapkan Pemerintah Kota.
4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan



administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas Perhubungan

5. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas.
6. Pengawasan dan Pengendalian bidang Perhubungan.
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
8. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas.
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

A. SEKRETARIAT

1. TUGAS POKOK SEKRETARIAT

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan Pengelolaan Barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- c. Sekretariat membawahi sub bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

2. FUNGSI SEKRETARIAT

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan.
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan.
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan

layanan informasi dan pengaduan.

- f. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
- g. Pengelolaan anggaran dinas dan penerimaan dinas/retribusi.
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai.
- i. Pelaksanaan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan.
- j. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- k. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- l. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan.
- m. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sesuai tugas fungsi dinas.
- n. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- o. Pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi yang digunakan oleh lintas bidang pada dinas.
- p. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- q. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. BIDANG LALU LINTAS JALAN

1. TUGAS BIDANG LALU LINTAS JALAN

- a. Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Lalu Lintas Jalan.
- b. Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas

2. FUNGSI BIDANG LALU LINTAS JALAN

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya.



- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Lalu Lintas, Pengendalian dan Ketertiban, dan Perparkiran.
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu Lintas, Pengendalian dan Ketertiban, dan Perparkiran.
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang Lalu Lintas, Pengendalian dan Ketertiban, dan Perparkiran.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Lalu Lintas, Pengendalian dan Ketertiban, dan Perparkiran.
- f. Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan.
- g. Pengembangan pelayanan sistem jaringan lalu lintas jalan raya dan pengelolaannya, pengendalian dan operasional.
- h. Penyiapan dan pelaksana koordinator forum lalu lintas.
- i. Penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan penetapan kinerja jalan.
- j. Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota serta koordinator pelaksanaan lomba tertib lalu lintas.
- k. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota.
- l. Pelaksanaan pungutan dan penyetoran retribusi berkaitan operasional parkir dan penderekan.
- m. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
- n. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan keharmonisan pelaksanaan pedoman dan standarisasi pengembangan sistem jaringan jalan, perekomendasian, pemantauan, perizinan penyelenggaraan dan pengoperasian dampak pembangunan sesuai norma, standar dan prosedur manajemen rekayasa lalu lintas.
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Lalu Lintas, Pengendalian dan Ketertiban, dan Perparkiran.
- p. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.



- q. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. BIDANG PRASARANA

1. TUGAS BIDANG PRASARANA

- a. Bidang Prasarana mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis prasarana dan fasilitas perhubungan.
- b. Bidang Prasarana dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.
- c. Bidang Prasarana membawahi seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.

2. FUNGSI BIDANG PRASARANA

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Prasarana dan Fasilitas Perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda.
- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang prasarana serta lampu penerangan jalan umum dan fasilitas perhubungan meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Prasarana dan Fasilitas Perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda.
- d. Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan teknis prasarana perhubungan serta lampu penerangan jalan umum dan pengelolaannya, pengendalian dan pemeliharaan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku.
- e. Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan serta lampu

penerangan jalan umum.

- f. Pengelolaan dan pemeliharaan terminal penumpang Tipe C.
- g. Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan operasional terminal Tipe C.
- h. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan keharmonisan pelaksanaan pedoman dan standarisasi pengembangan fasilitas dan prasarana, perekomendasian, pemantauan, perizinan penyelenggaraan dan pengoperasian prasarana perhubungan.
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda.
- j. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- k. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. BIDANG KESELAMATAN

1. TUGAS BIDANG KESELAMATAN

- a. Bidang Keselamatan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis keselamatan terhadap jasa/pelayanan perhubungan.
- b. Bidang Keselamatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.
- c. Bidang Keselamatan membawahi seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.

2. FUNGSI BIDANG KESELAMATAN

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang



Keselamatan Perhubungan meliputi Keselamatan Jalan dan Pelayaran.

- c. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang Keselamatan Perhubungan meliputi Keselamatan Jalan dan Pelayaran.
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Keselamatan Perhubungan meliputi Keselamatan Jalan dan Pelayaran.
- f. Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan teknis Keselamatan Perhubungan dan pengelolaannya, pengendalian dan pemeliharaan.
- g. Penyiapan dan pelaksanaan kegiatan Dewan Maritim Kota.
- h. Pelaksanaan penyusunan program audit, investigasi terhadap Keselamatan Perhubungan, Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Pengujian Kelaikan Kapal.
- i. Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan Pengujian Kendaraan Bermotor dan pengukuran dan Pengujian Kelaikan Kapal.
- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Keselamatan Perhubungan meliputi Keselamatan Jalan, Pelayaran dan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- k. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

E. BIDANG ANGKUTAN

1. TUGAS BIDANG ANGKUTAN

- a. Bidang Angkutan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis keselamatan terhadap jasa/pelayanan perhubungan.
- b. Bidang Angkutan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah



dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.

2. FUNGSI BIDANG ANGKUTAN

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Angkutan meliputi Angkutan Jalan, Angkutan dan Dermaga Sungai dan Angkutan Khusus.
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data perumusan Angkutan.
- d. Pelaksanaan kegiatan perumusan Angkutan.
- e. Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan trayek dan operasional dermaga.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait perumusan Angkutan.
- g. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data perumusan pepadu moda.
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Angkutan meliputi Angkutan Jalan, Angkutan dan Dermaga Sungai dan Angkutan Khusus.
- i. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. TUGAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

- a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis keselamatan terhadap jasa/pelayanan perhubungan.
- b. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh kepala UPT



yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.

2. FUNGSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan UPTD.
- b. Pelayanan pemeriksaan teknis dan sertifikasi kelaikan jalan kendaraan bermotor.
- c. Pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas dan peralatan uji berkala.
- d. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat dan perlengkapan.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program
3. Bidang Lalu Lintas Jalan membawahkan :
 - a. Seksi Lalu Lintas
 - b. Seksi Pengendalian & Ketertiban
 - c. Sub Koordinator Parkir
4. Bidang Prasarana membawahkan :
 - a. Seksi Prasarana Jalan
 - b. Seksi Prasarana Sungai
 - c. Sub Koordinator Multimoda



5. Bidang Keselamatan membawahkan :
 - a. Seksi Keselamatan Jalan
 - b. Seksi Keselamatan Pelayaran
6. Bidang Angkutan membawahkan :
 - a. Seksi Angkutan & Dermaga Sungai
 - b. Seksi Angkutan Khusus
 - c. Sub Koordinator Angkutan Jalan
7. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Samarinda



D. SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Samarinda terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya seperti peralatan/ perlengkapan/ aset. Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.

1. Sumber Daya Manusia

Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan seperti pada tabel berikut :

Tabel 1
Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2021 – 2024

Jabatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Eselon II	0	0	1	0	1	0	1	0
Eselon III	5	0	5	0	5	0	5	0
Eselon IV	13	2	13	2	11	2	12	2
Jumlah	19	2	19	2	17	2	18	2
Total	21		21		19		20	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2024

Tabel 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2021 – 2024

Kualifikasi Pendidikan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Sekolah Dasar (SD)	3	0	3	0	2	0	1	0
SMP	4	0	4	0	3	0	3	0
SMA / SMK	61	9	42	10	41	4	35	4
Ahli Muda (D-II)	1	0	1	0	1	0	1	0
Sarjana Muda (D-III)	7	2	7	2	5	2	3	2
Sarjana (S1/D-IV)	17	7	17	7	16	10	22	9
PascaSarjana (S2)	8	0	8	0	10	0	8	0
Jumlah	100	18	81	19	77	16	73	15
Total	118		100		93		88	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2024

Tabel 3
Pegawai Tidak Tetap Harian / Pegawai Tidak Tetap Bulanan Tahun 2021 – 2024

Kualifikasi Pendidikan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Sekolah Dasar (SD)	19	1	19	1	0	0	0	0
SMP	17	0	17	0	3	0	3	0
SMA / SMK	187	25	187	25	131	14	117	13
D – I	1	0	1	0	1	0	1	0
D – II	3	0	3	0	3	0	2	0
Sarjana Muda (D-III)	7	0	7	0	7	2	7	2
Sarjana (S1/D-IV)	35	76	35	76	83	24	75	20
Sarjana (S2)	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	273	102	273	102	228	40	205	35
Total	375		375		268		240	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2024

Tabel 4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2021 – 2024

Pangkat dan Golongan		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		L	P	L	P	L	P	L	P
I/a	Juru Muda	0	0	0	0	0	0	0	0
I/b	Juru Muda Tk. I	3	0	3	0	0	0	0	0
I/c	Juru	0	0	0	0	2	0	1	0
I/d	Juru Tk. I	3	0	3	0	0	0	0	0
II/a	Pengatur Muda	1	0	1	0	4	0	6	0
II/b	Pengatur Muda Tk. I	13	2	13	2	1	1	2	0
II/c	Pengatur	21	3	21	3	11	2	6	2
II/d	Pengatur Tk. I	23	2	23	2	15	2	6	1
III/a	Penata Muda	3	0	3	0	15	2	20	2
III/b	Penata Muda Tk. I	9	7	9	7	2	0	6	0
III/c	Penata	9	3	9	3	3	5	3	5
III/d	Penata Tk. I	8	4	8	4	13	6	6	4
IV/a	Pembina	5	0	5	0	7	0	15	1
IV/b	Pembina Tk. I	1	0	1	0	2	0	2	0
IV/c	Pembina Utama Muda	1	0	1	0	0	0	0	0
IV/d	Pembina Utama Madya	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		100	21	100	21	75	16	73	15
TOTAL		121		121		93		88	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2023

2. Sumber Daya Lainnya

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Samarinda. menempati Kantor Wilayah Koperasi Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2001, selain prasarana Kantor juga dilengkapi sumber daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, Sarana dan Prasarana tersebut dalam kondisi baik dan kurang baik.

Tabel 5
Aset Dinas Perhubungan Kota Samarinda Per 31 Desember Tahun 2022 - 2024

No	Nama Barang (Berdasarkan Bidang Barang)	Keadaan Per 31 Des 2023		Keadaan Per 31 Des 2024	
		Jumlah	Harga (Ribuan)	Jumlah	Harga (Ribuan)
1.	Tanah	13	92,537,149,000.00	13	92.537.149.000,00
2.	Alat -alat Besar	245	10,701,684,742.00	3	4.892.281.742,00
3.	Alat-alat Angkutan	85	11,750,231,410.00	71	9.180.961.410,00
4.	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	52	5,066,384,270.00	38	4.948.625.370,00
5.	Alat Pertanian	6	11,045,000.00	2	8.000.000,00
6.	Alat kantor dan rumah tangga	1365	20,900,210,336.00	1099	20.138.720.607,00
7.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1437	4,998,124,426.00	1106	4.153.384.766,00
8.	Alat-alat kedokteran	5	344,631,400.00	4	337.131.400,00
9.	Alat-alat Laboratorium	682	27,374,575,876.00	80	1.867.844.550,00
10.	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	13	112,180,400.00	1	49.885.000,00
11.	Bangunan Gedung	64	52,047,429,809.00	50	33.642.806.128,00
12.	Jalan dan Jembatan	-	23,178,738,845.00	4	40.282.806.128,00
13.	Bangunan Air/Irigasi	-	961,146,500.00	1	44.825.000,00
14.	Instalasi	-	7,062,997,250.00	5	6.871.898.450,00
15.	Jaringan	12	15,270,465,833.00	12	10.276.869.477,00



Lanjutan Tabel 1.5

No	Nama Barang (Berdasarkan Bidang Barang)	Keadaan Per 31 Des 2023		Keadaan Per 31 Des 2024	
		Jumlah	Harga (Ribuan)	Jumlah	Harga (Ribuan)
16	Aset Lainnya	10	269,908,754,477.00	131	269.522.869.477,00
17	Aset Kondisi rusak berat/hilang/lainnya	-	1,390,030,439.00	-	1.390.030.439,00
18	Aset yang dimanfaatkan pihak Lain	-	267,307,600,638.00	-	267.307.600,00
19	Aset Tidak Berwujud	-	1,211,123,400.00	11	825.238.400,00
JUMLAH		3989	812,134,504,051.00	2631	501.238.372.675,00

Tabel 6

Data Sarana Operasional Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2021 – 2024

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Keterangan
Mobil Operasional	10	10	10	10	Kondisi Baik
Mobil Derek	3	3	3	3	Kondisi Baik
Mobil Uji Keliling	1	1	1	1	Kondisi Baik
Mobil APILL	2	2	2	3	Kondisi Baik
Mobil Dinas	13	13	13	13	Kondisi Baik
Sepeda Motor Operasional	16	16	16	16	Kondisi Baik
Sepeda Motor Dinas	31	31	31	31	Kondisi Baik
JUMLAH	76	76	76	77	Unit

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2024



E. ISU-ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan yang terangkat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, dimana isu strategis mengacu terhadap permasalahan yang memungkinkan mempunyai pengaruh yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi atau progres kinerja di masa mendatang. Dengan memprioritaskan penanganan identifikasi permasalahan tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan akan lebih besar.

Secara umum Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik yang menjadi kondisi urusan perhubungan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan komitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat, adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan antara lain :

1. Kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Samarinda yang baik, dengan indikator kepemilikan kendaraan pribadi yang meningkat baik roda dua maupun roda empat, berimbas pada minat penggunaan Jasa Angkutan Umum Kota yang menurun sehingga para pengusaha atau pemilik angkutan kota tidak dapat mencapai kondisi ideal secara ekonomi dalam usahanya sehingga tidak mampu untuk melakukan penggantian atau peremajaan armadanya.
2. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan belum optimal, Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan pertumbuhan infrastruktur jaringan jalan sehingga perbandingan volume dan kapasitas jalan (V/C Ratio) berdampak pada penundaan dan berpotensi terjadinya kemacetan lalulintas.
3. Pengelolaan perparkiran belum optimal untuk mengatasi kemacetan, Belum tersedianya kantong-kantong parkir yang belum memadai sehingga berdampak pada aktivitas parkir tepi jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya sehingga berpotensi terhadap ketidakdisiplinan berlalu lintas, kesemrawutan berlalu lintas dan mengurangi kapasitas jalan, hal ini dapat di antisipasi dengan gedung parkir.
4. Ketersediaan perlengkapan jalan belum optimal dari segi kuantitas dan kualitas, Fasilitas perlengkapan dan Keselamatan Jalan dalam bentuk Marka, Rambu, RPPJ, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan paku jalan serta pagar



pengaman jalan (Guardrail) belum sebanding dengan kebutuhan jaringan jalan yang terbangun, sehingga kondisi ini terkesan kurang optimalnya dalam memberikan informasi yang baik kepada masyarakat dalam berlalu lintas, hal ini dapat didukung dengan penganggaran yang proporsional.

5. Menurunnya kinerja angkutan umum di Kota Samarinda, Kurangnya partisipasi pengusaha angkutan sungai dan pengetahuan pemilik kapal di bidang Pelayanan Jasa Angkutan sehingga tingkat kinerja pelayanan angkutan sungai sangat rendah dan kurang diminati masyarakat.
6. Seluruh pemilik kapal sungai sangat sulit diberikan pemahaman dikarenakan latar belakang pendidikan formal yang mereka miliki.

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan sistematika yang dianjurkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

A. RENCANA STRATEGIS

B. PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Realisasi kinerja mengacu pada standar nasional/lainnya
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan menyeluruh LKjIP Dinas Perhubungan Kota Samarinda tahun 2024.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana tertera pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Memasuki Tahun 2021, Dinas Perhubungan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026. Renstra Dinas Perhubungan merupakan manifestasi komitmen Dinas Perhubungan dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026. Dan pada Tahun 2023, Dinas Perhubungan menyusun Perubahan Rencana Strategis (P - Renstra) Tahun 2021 - 2026, Perubahan Rencana Strategis (P - Renstra) Tahun 2021 - 2026 Dinas Perhubungan merupakan manifestasi komitmen Dinas Perhubungan dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026.

RPJMD Pemerintah Kota Samarinda merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda. Rencana Strategis (Renstra) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan yang harus dilaksanakan secara terpadu,



sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra ini disusun untuk lebih mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda. Adapun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan diuraikan berikut ini.

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Pada dasarnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD merupakan penjabaran secara terperinci dari perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda, dengan demikian setiap tahapan-tahapan yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026.

Memperhatikan prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMD serta berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda 2005 – 2025 yang telah ditetapkan pada peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015, maka Visi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN “

Untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026, maka ditetapkan 5 (Lima) Misi dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 sebagai bentuk upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi tersebut. Adapun Misi pada RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya**
- 2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri berkerakyatan dan berkeadilan**
- 3. Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat**
- 4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern**
- 5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari**



2. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan juga merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan Misi. Dalam rangka mewujudkan keselarasan antara Sasaran Perubahan RPJMD dengan Dokumen Perubahan Renstra, maka Sasaran RPJMD menjadi Tujuan Renstra Dinas Perhubungan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Perhubungan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategi yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Selain Sasaran utama tersebut pada Dokumen Perubahan Renstra ditetapkan pula Sasaran tambahan sebagai Sasaran Pendukung pada Program Kegiatan Rutin, Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan RPJMD Kota Samarinda pada Misi Ke. 4 (empat) tersebut adalah **“Terwujudnya sistem transportasi strategis yang terintegrasi “**dengan indikator **Rasio konektifitas kota**. Sedangkan Sasaran RPJMD untuk mendukung terwujudnya misi tersebut adalah **Meningkatnya Aksesibilitas Inter Dan Antar Wilayah Kota** dengan indikator **“ Presentase ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi ”**, selain Sasaran utama tersebut pada Dokumen Perubahan RPJMD ditetapkan pula Sasaran tambahan sebagai Sasaran Pendukung pada Program Kegiatan Rutin, Sasaran tersebut berbunyi **“ Meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat** dengan indikator **“ Indeks pelayanan prima ”**. Sasaran RPJMD Kota Samarinda ini selanjutnya menjadi Tujuan Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2021-2026 yang selaras dengan RPJMD Kota Samarinda 2021-2026 tergambar dalam tabel berikut :



Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Aksesibilitas Inter Dan Antar Wilayah Kota		Presentase ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi	41.96	47.45	58.12	73.92	74.53	96.86
	Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	0.55	0.53	0.51	0.49	0.47	0.45
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat		Indeks pelayanan prima	84.48	70.33	92.00	94.00	95.00	96.00
	Meningkatnya kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat Daerah	73.00	73.26	100	100	100	100

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. STRATEGI

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi Perangkat Daerah. Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Proses perencanaan strategis merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan mempertahankan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan.

Adapun strategi Dinas Perhubungan dalam Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi darat dan sungai.



2. Mewujudkan aksesibilitas Publik terhadap layanan transportasi kereta api.
3. Meningkatkan sistem pelayanan publik.

Tabel. 8

Rencana Strategis Periode Tahun 2021-2026 Dinas Perhubungan Kota Samarinda

No	Uraian	Indikator
1.	Core Busniess (Fungsi Utama) PD Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Penyediaan insfratuktur transportasi dan fasilitasi perlengkapan jalan
2.	Visi	Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban
3.	Misi	Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern
4.	Permasalahan	1. Kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Samarinda yang baik, dengan indikator kepemilikan kendaraan pribadi yang meningkat baik roda dua maupun roda empat. 2. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan belum optimal. 3. Ketersediaan perlengkapan jalan belum optimal dari segi kuantitas dan kualitas. 4. Terbatasnya Kualitas dan kuantitas SDM yang bersertifikat keahlian di bidang perhubungan
5.	Tujuan	1. Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota Indikator. 2. Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat Indikator
6.	Sasaran	1. Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan. 2. Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah
7.	Strategi	1. Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi darat dan sungai. 2. Mewujudkan aksesibilitas Publik terhadap layanan transportasi kereta api. 3. Meningkatkan sistem pelayanan publik.
8.	Arah Kebijakan	1. Penyediaan infrastruktur transportasi dan fasilitas perlengkapan jalan. 2. Penyediaan lintasan/rute angkutan Kereta Api. 3. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.
9.	Program	1. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). 2. Program pengelolaan pelayaran 3. Program pengelolaan perkeretaapian 4. Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



2. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran sehingga memperjelas strategi menjadi lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi Walikota Samarinda. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perhubungan Kota Samarinda memiliki Arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyediaan infrastruktur transportasi dan fasilitas perlengkapan jalan.
2. Penyediaan lintasan/rute angkutan Kereta Api.
3. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Tabel 9

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2016 untuk Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Tabel T-C.26, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

VISI : TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI PUSAT KOTA PERADABAN			
MISI : MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG MANTAP DAN MODERN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota Indikator	Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi darat dan sungai	Penyediaan infrastruktur transportasi dan fasilitas perlengkapan jalan
		Mewujudkan aksesibilitas Publik terhadap layanan transportasi kereta api	Penyediaan lintasan/rute angkutan kereta api
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat Indikator	Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan sistem pelayanan publik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang pedoman penyusunan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Nomor : 800.01/343/100.05 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Nomor 800.01/05/100.05 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Samarinda dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 10 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Samarinda

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	ALASAN	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Indikator tersebut adalah indikator IKK	$\frac{\text{Volume rata-rata kendaraan jalan (smp/jam)}}{\text{Kapasitas jalan}}$	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2.	Meningkatnya kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Indikator Penunjang	$\frac{\text{Total Capaian Program (Persen)}}{\text{Jumlah Program}}$	RPJMD & Renstra	Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda

D. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Penyusunan rencana kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang indikator kinerja dan target yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan, dimana penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan realitas dengan memperhatikan tujuan dan sasaran serta data pendukung yang harus disiapkan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2024 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2024, secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 11.
Perjanjian Kinerja 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0.49	Rasio
2.	Meningkatnya kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100	%

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Samarinda melaksanakan kegiatan dengan Anggaran Murni (APBD Tahun 2024) sebesar Rp. 103.304.229.092,- (*seratus tiga milyar tiga ratus empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah*). Melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 107.449.873.674,-

(seratus tujuh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah). Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel sebagaimana di bawah ini :

Tabel 12.
Pagu Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Indikator
Kinerja sampai dengan APBD-P Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 46.330.558.201,-	Rp. 49.137.581.583,-	APBD 2024
2.	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Rp. 51.548.670.891,-	Rp. 52.349.291.971,-	APBD 2024
3.	Program pengelolaan pelayaran	Rp. 4.625.000.000,-	Rp. 5.163.000.000,-	APBD 2024
4.	Program pengelolaan perkeretaapian	Rp. 800.000.000,-	Rp. 800.000.000,-	APBD 2024
TOTAL		Rp. 103.304.229.092,-	Rp. 107.449.873.674,-	

Perjanjian kinerja diatas memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan Indikator Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) didalam Sub Bab ini akan memuat Indikator Program secara terperinci. Adapun rincian Indikator Program adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Rincian Indikator Program

No	Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,00 %
2.	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan	0.89 Rasio
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio konektivitas angkutan sungai	1.00 Rasio
4.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian tersedia	1 Dokumen

Tabel diatas memuat rincian program, Indikator Program beserta target yang akan dicapai ditahun 2024, Indikator Program ini merupakan indikator kinerja Esselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang), Selain indikator program didalam Sub Bab ini akan memuat Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan secara terperinci. Adapun rincian



Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

TABEL 14
KETERKAITAN SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA, TARGET,
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100%	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	IKM	76.73	49.137.581.583,00
				Perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	NILAI AKIP	75,75	200.000.000,00
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 Dokumen	100.000.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	50.000.000,00
				Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	50.000.000,00
				Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan	1 Laporan	21.431.581.382,00
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	93 Pegawai	13.072.846.930,00



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)
				Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen	8.319.171.952,00
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4 Laporan	39.562.500,00
				Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah laporan	1 Laporan	873.006.000,00
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	61.000.000,00
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	100.000.000,00
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket	18.060.000,00
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	290.075.000,00
				Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan	53.872.000,00
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	349.999.000,00



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	4 Laporan	435.000.000,00
				Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	6 Unit	415.000.000,00
				Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Paket	20.000.000,00
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan penyedia jasa	4 Laporan	25.139.759.542,00
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	25.009.949.542,00
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan	129.810.000,00
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan pemeliharaan	4 Laporan	1.058.234.659,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		224.000.000,00



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30 Unit	580.414.659,00
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	25.000.000,00
				Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	37.320.000,00
				Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	191.500.000,00
Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota	Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	0.49 Rasio	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan	0.89	52.349.291.971,00
				Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah perlengkapan jalan tersedia	9 Unit	45.907.032.471,00
				Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten / kota yang tersedia	7 Unit	42.952.835.641,00
				Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	0



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)
				Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang ter rehabilitasi dan Terpelihara	7 Unit	2.954.196.830,00
				Pengelolaan terminal penumpang tipe C	Jumlah terminal tipe C terkelola	1 Unit	0
				Pembangunan gedung terminal Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas Penunjang	1 Unit	0
				Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Jumlah fasilitas parkir tersedia	4 Laporan	3.017.259.500,00
				Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	4 Laporan	3.017.259.500,00
				Pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan	32.428 Unit	1.652.000.000,00
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	1 Unit	500.000.000,00
				Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	7 Orang	75.000.000,00



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)
				Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	25.000 Dokumen	300.000.000,00
				Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	4 Laporan	50.000.000,00
				Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	10.000 meter persegi	700.000.000,00
				Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	4 Laporan	550.000.000,00
				Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten / kota	4 Laporan	100.000.000,00
				Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/ kota	4 Dokumen	200.000.000,00
				Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota	4 Laporan	50.000.000,00



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)
				Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	200.000.000,00
				Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin	4 Laporan	50.000.000,00
				Pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin	Jumlah laporan rekomendasi persetujuan teknis Andalalin yang terawasi	4 Laporan	50.000.000,00
				Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	4 Laporan	450.000.000,00
				Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	4 Laporan	350.000.000,00
				Peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ	Jumlah auditor dan inspektor lalu lintas dan angkutan jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	50.000.000,00
				Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah laporan uji petik terhadap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	4 Laporan	50.000.000,00



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)
				Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia	1 Dokumen	100.000.000,00
				Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten / kota	4 Laporan	100.000.000,00
				Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan	1 Dokumen	550.000.000,00
				Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	1 Dokumen	400.000.000,00
				Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan tersosialisasinya rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	4 Dokumen	150.000.000,00
				Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah/kota	Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang	4 Laporan	100.000.000,00



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)
				Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah laporan pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten / kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	4 Laporan	100.000.000,00
				Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio konektivitas angkutan sungai	0.80	5.163.000.000,00
				Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota	1 Laporan	100.000.000,00
				Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan kabupaten / kota	1 Laporan	100.000.000,00
				Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan	1 Laporan	100.000.000,00



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)
				Pengendalian dan pengawasan jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam kabupaten/kota	Jumlah laporan Pengendalian dan pengawasan jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	4 Laporan	100.000.000,00
				Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau	Jumlah dokumen penetapan rencana induk DLKR/DL KP pelabuhan sungai	1 Dokumen	500.000.000,00
				Pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau	Jumlah dokumen rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR) / daerah lingkungan kepentingan (DLKP) pelabuhan sungai dan danau	1 Dokumen	500.000.000,00
				Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	4 Laporan	4.463.000.000,00
				Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah pelabuhan sundai dan danau yang beroperasi dan terpelihara	5 Unit	100.000.000,00



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)
				Pembangunan Dermaga sungai dan danau	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang dibangun	2 Unit	3.538.000.000,00
				Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah dermaga sungai dan danau yang dipelihara	5 Unit	750.000.000,00
				Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau penyeberangan	Jumlah fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau penyeberangan	5 Unit	75.000.000,00
				Program Pengelolaan Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian tersedia	1 Dokumen	800.000.000,00
				Penetapan rencana induk perkeretaapian	Jumlah laporan pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian	1 Dokumen	800.000.000,00
				Pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian	Jumlah dokumen studi kelayakan (FS) jaringan jalur rel dalam kota samarinda beserta turunannya	1 Dokumen	800.000.000,00
							107.381.127.674,00

Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan/ Sasaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2024.

Tabel 15
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas Kota.	Tingkat V/C Ratio Di Jalan Kota.	VC Ratio di Jalan Kota.	0,49	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab./ Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab./ Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kab./Kota
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe-C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab./Kota
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
						Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
						Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
						Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab./Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota



						Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
						Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
						Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
					Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin
					Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
						Peningkatan kapasitas auditor dan inspektur LLAJ
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota
						Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan orasng dan/barang antar kota dalam 1 (satu) Kab./Kota
					Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
						Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan



					Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Pengendalian dan pengawasan jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota
					Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau	Pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau
					Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau
						Pembangunan dermaga sungai dan danau
						Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
						Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau penyeberangan Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
				Program Pengelolaan Perkeretaapian	Penetapan rencana induk Perkeretaapian	Pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP OPD.	77,25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
						Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
						Penyediaan bahan logistik kantor



						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
						Fasilitasi kunjungan tamu
						Peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
					Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Pengadaan mebel
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
						Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
						Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya



Kemudian disajikan matriks anggaran setiap sasaran strategis pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 16. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Tingkat V/C Ratio Di Jalan Kota	Rp. 58.312.291.971,-	54,27%	● APBD Tahun 2024 Rp. 56.973.670.891,- ● APBD Perubahan Tahun 2024 bertambah sebesar Rp. 1.338.621.080,-
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 49.137.581.583,-	45,73%	● APBD Tahun 2024 Rp. 46.530.558.201,- ● APBD Perubahan Tahun 2024 bertambah sebesar Rp. 2.809.023.382,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasarannya, yang hasilnya akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Penilaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan mengacu pada Renstra dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan perjanjian kinerja tahun 2024. Dengan ini disusunlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk menggambarkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja di mulai dari Target Tujuan Dinas Perhubungan yang merupakan Sasaran RPJMD Kota Samarinda lalu mengukur indikator sasaran strategis/Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Samarinda, selanjutnya mengukur target indikator program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran Tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi, sebagai berikut:

Tabel 17 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
1	$90,01\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$75,01\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01\% \leq 75\%$	Sedang
4	$50,01\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

1.1 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA INDIKATOR TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan Misi. Dalam rangka mewujudkan keselarasan antara Sasaran Perubahan RPJMD dengan Dokumen Perubahan Renstra, maka Sasaran RPJMD menjadi Tujuan Renstra Dinas Perhubungan, sehubungan dengan hal tersebut maka Tujuan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota

Indikator : *Presentase ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi*

2. Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat

Indikator : *Indeks pelayanan prima*

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian Tujuan Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang merupakan Sasaran RPJMD Kota Samarinda yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Adapun analisis pengukuran target kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = 6/5*100	(8)
1	Meningkatnya Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Persentase ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi	Persen	73,92	74,01	100,12	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks pelayanan prima	Persen	94,00	64,6	68,72	Sedang

Tujuan 1 : Meningkatnya Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota

Makna meningkatkan aksesibilitas inter dan antar wilayah kota adalah suatu upaya untuk meningkatkan aksesibilitas baik di dalam wilayah kota Samarinda maupun antar wilayah kota, adapun upaya yang di lakukan adalah dengan penyediaan sarana prasarana sistem transportasi yang memadai, aman, nyaman yang terkoneksi dan terintegrasi sesuai yang tertuang dalam 10 Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2021 – 2026.

Tolak ukur capaian tujuan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dapat di ukur dengan indikator persentase ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi dengan formulasi:

$$\frac{\sum \text{Sarana Prasarana Tersedia}}{\sum \text{Sarana Prasarana Kebutuhan}} \times 100 \%$$

Adapun rincian pencapaian indikator tujuan Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang merupakan sasaran RPJMD Kota Samarinda dapat di lihat di tabel dibawah ini :



Tabel 19. Rincian Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Samarinda

No	Sarana Prasarana Sistem Transportasi	Sarana Prasarana Transportasi Yang Tersedia 2024	Kebutuhan	Satuan	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)/(4)x100
1	Jaringan ATCS	30	40	Lokasi	75,00
2	Rambu – rambu	378	650	Unit	58,15
3	APILL	40	40	Lokasi	100,00
4	LPJU	3303	5000	Tiang	66,06
5	Halte	39	39	Lokasi	100,00
6	Terminal Tipe C	1	1	Unit	100,00
7	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	1	1	Unit	100,00
8	Jaringan jalan rel (stadion sempaja – APT. Pranoto)	0	25	KM	0,00
9	Trayek angkutan umum massal berbasis jalan raya	7	7	Koridor	100,00
10	Angkutan Umum (Angkot)	16	18	Trayek	88,89
11	Simpul Transportasi	0	2	Titik	0,00
12	Dermaga	5	5	Unit	100,00
Jumlah					74,01

Dalam rangka mendukung Tujuan Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar wilayah dan indikator persentase ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi. Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan realisasi 100,12% (seratus persen koma dua belas). Pada tahun 2024 indikator persentase ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi di tetapkan sebesar 73,92% dan dengan capaian realisasi sebesar 74,01%.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perhitungan hasil formulasi indikator ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi dapat tercapai targetnya dengan

meningkatnya atau bertambahnya beberapa jumlah sarana prasarana perlengkapan jalan yang terbangun di kota samarinda serta didukung oleh kinerja yang efektif dengan SDM yang unggul dan memadai serta anggaran yang menunjang program kegiatan pengadaan dan penyediaan sarana prasarana sistem transportasi, dengan uraian Berdasarkan program kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENYELENGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Dalam rangka mendukung sasaran Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar wilayah dan indikator Persentase ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi, Adapun sarana dan prasarana sistem transportasi yang dianggarkan berdasarkan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari 6 (enam) Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 52.349.291.971,00 dan Realisasi sebesar Rp. 51.774.364.889,00 yang dapat di uraikan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota

Pada kegiatan Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota dengan 3 (tiga) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 45.907.032.471,00 dan realisasi sebesar Rp. 45.485.802.201,00 Untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi diantaranya adalah

- **Jaringan Area Traffic Control Sistem (ATCS)**

Berdasarkan kebutuhannya Jaringan Area Traffic Control Sistem (ATCS) adalah sebanyak 40 (empat puluh) lokasi dan pada tahun 2024 telah tersedia sebanyak 30 (tiga puluh tujuh) lokasi yang tersebar di titik simpang didalam kota Samarinda.

- **Rambu-Rambu Lalu lintas**

Adapun kebutuhan Rambu – rambu lalu lintas di jalan adalah sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) Buah dan pada tahun 2024 telah tersedia sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) buah, yang tersebar diruas - ruas jalan kota Samarinda.

- **Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)**

Adapun kebutuhan APILL di jalan Kota Samarinda adalah sebanyak 40 (empat puluh) lokasi dan pada tahun 2024 telah tersedia sebanyak 40 (empat puluh) lokasi yang tersebar di titik simpang didalam kota Samarinda.



- **Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)**

Adapun kebutuhan LPJU di jalan Kota Samarinda adalah sebanyak 5000 (Lima ribu) tiang dan sampai dengan tahun 2024 telah tersedia sebanyak 3303 (Tiga ribu tiga ratus tiga) tiang yang tersebar di ruas-ruas jalan di kota Samarinda.

- **Halte**

Adapun kebutuhan pada kota Samarinda adalah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lokasi, dan sampai dengan tahun 2024 telah tersedia sebanyak 39 (Tiga puluh Sembilan) lokasi dalam kondisi baik yang tersebar didalam wilayah kota Samarinda.

b. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Pada Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp. 0, hal ini dikarenakan masih menunggu proyek Pembangunan Teras tahap II.

- **Terminal Tipe C**

Adapun kebutuhan terminal tipe C adalah sebanyak 1 (satu) unit dan sampai dengan tahun 2024 telah tersedia sebanyak 1 (Satu) unit terminal tipe C yang berlokasi di pasar pagi.

c. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pada Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan dengan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.625.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.600.064.450,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi dalam Upaya meningkatkan pelayanan dan menjamin keselamatan dalam sistem transportasi khususnya untuk kendaraan umum & angkutan barang dan untuk tahun – tahun selanjutnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor akan semakin di tingkatkan.

- **Unit Pengujian Kendaraan Bermotor**

Adapun Unit Pengujian Kendaraan Bermotor sampai dengan tahun 2024 telah tersedia sebanyak 1 (Satu) unit yang berlokasi di Jalan HM. Ardans.

d. Kegiatan Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Pada kegiatan Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu)



daerah kabupaten/kota terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 550.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 549.515.493,00 dimana anggaran tersebut digunakan untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi yakni :

- **Trayek angkutan umum massal berbasis jalan raya**

Adapun yang telah direncanakan ketersediaannya dengan target 7 (tujuh) koridor, dan sampai dengan tahun 2024 ini upaya untuk mencapai target tersebut telah dilaksanakannya penyusunan dokumen rencana umum jaringan trayek perkotaan dan didalam dokumen kajian tersebut ditetapkan 7 (tujuh) koridor dan 6 (enam) feeder.

e. Kegiatan Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah/kota

Pada Kegiatan ini terdiri 1 (satu) Sub Kegiatan yakni Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah/kota dengan didukung anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 89.842.160,00 dimana anggaran tersebut digunakan untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi yakni :

- **Angkutan Umum (Trayek)**

Dalam mendukung adalah tersedianya infrastruktur massal berbasis jalan raya dan jalan rel yang menghubungkan 10 (Sepuluh kecamatan) dalam kota, dan salah satu infrastruktur tersebut adalah Angkutan Umum (Angkot), dan Trayek angkutan umum yang dibutuhkan adalah sebanyak 18 (delapan belas) trayek angkutan umum dan sampai dengan tahun 2024 telah tersedia sebanyak 16 (Enam belas) trayek angkutan umum.

f. Kegiatan Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota

Pada kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 550.000.000,00 dan realisasi Rp. 547.956.050,00. Dimana pada 4 (empat) sub kegiatan tersebut tetap dapat terlaksana untuk mendukung tujuan dan sasaran dinas.



- **Simpul Transportasi**

Simpul transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang telah direncanakan ketersediaannya dengan target sebanyak 2 (Dua) simpul yaitu Sungai kunjang dan APT. Pranoto, namun sampai dengan tahun 2024 ini target tersebut belum terealisasi dikarenakan program kegiatan yang mendukung target tersebut belum berjalan, dan untuk tahun – tahun selanjutnya telah disusun program kegiatan yang mendukung target tersebut maka dengan begitu target tersedianya simpul transportasi akan terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.

II. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Dalam rangka mendukung sasaran Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar wilayah dan indikator Persentase ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi, Adapun sarana dan prasarana sistem transportasi yang dianggarkan berdasarkan Program Pengelolaan Pelayaran, Program ini terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.163.000.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 5.096.466.581,00 di antaranya adalah :

- **Dermaga**

Adapun kebutuhan dermaga di kota Samarinda saat ini adalah sebanyak 5 (Lima) unit dan sampai dengan tahun 2024 telah tersedia sebanyak 5 (Lima) unit. Dimana kondisi Pelabuhan dan Dermaga Sungai kota samarinda dalam kondisi baik.

III. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mendukung sasaran Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar wilayah dan indikator Persentase ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi, Adapun sarana dan prasarana sistem transportasi yang dianggarkan berdasarkan Pada Program Pengelolaan Perkeretaapiian dalam 1 (satu) kegiatan yakni Penetapan Rencana Induk Perkeretaapiian dengan 1 (satu) Sub kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapiian sebesar Rp. 800.000.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 797.692.960,00 yakni pada kegiatan :

- **Jaringan jalan rel (stadion sempaja – APT. Pranoto)**

Jaringan jalan rel yang telah direncanakan ketersediaannya dengan target sepanjang ± 25 (Dua puluh lima) kilo meter (Stadion Sempaja – APT. Pranoto), dan sampai dengan tahun 2024 ini upaya untuk mencapai target tersebut telah dilaksanakan, adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah dengan menyusun Dokumen rencana induk perkeretaapian dan untuk tahun – tahun selanjutnya penyusunan dokumen bidang perkeretaapian akan terus dilakukan secara bertahap.

Tujuan 2 : Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat

Selain tujuan utama pada Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2021 – 2026 Dinas Perhubungan Kota Samarinda menetapkan 1 (satu) tujuan tambahan sebagai tujuan Pendukung pada Program Kegiatan Rutin, Tujuan tersebut adalah meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat makna Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat adalah suatu kondisi meningkatnya pelayanan Dinas Perhubungan Kota Samarinda kepada masyarakat khususnya masyarakat pengguna jasa perhubungan.

Tolok ukur capaian Tujuan Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat diukur dengan Indikator **Indeks pelayanan prima**.

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Capaian indikator Indeks pelayanan prima diuraikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 20. Rincian Kinerja Indikator Tujuan Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5/4*100	(7)
1.	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks pelayanan prima	94,00	64,6	68,72	Sedang

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota. Selanjutnya untuk penentuan nilai Indeks

Pelayanan Prima (IPP) Tahun 2024 dilaksanakan dengan melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri yang telah dilakukan validasi oleh Kementerian PANRB terhadap UPTD pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Samarinda dengan Nilai Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 sebesar 3,23 (Predikat B-) Baik (Dengan Catatan) dimana Unit Pelayanan sudah mencapai tingkat pelayanan yang baik, tetapi masih ada beberapa aspek yang perlu di perbaiki serta sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan, memiliki sarana dan prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal. Untuk dapat mengkonversi nilai IPP tersebut menjadi persentase maka di lakukan dengan rumus :

$$Persentase = \left(\frac{\text{Nilai IPP}}{5} \right) \times 100$$

Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \left(\frac{\text{Nilai IPP}}{5} \right) \times 100 \\ &= \left(\frac{3,23}{5} \right) \times 100 \\ &= (0,646) \times 100 \\ &= 64,6 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan capaian kinerja pada indikator pelayanan prima dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sedang, meskipun demikian penting bagi Dinas Perhubungan khususnya UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan demi kepuasan pelanggan dan keberhasilan jangka panjang.

Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan mengukur indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna pelayanan publik. Kepuasan masyarakat menunjukkan kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, karena indikator utama penyelenggaraan pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan. Semakin puas masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan maka semakin tinggi juga kinerja pemerintah



dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Oleh karena itu, dengan adanya Survei kepuasan masyarakat ini akan terumus indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap suatu jenis layanan.

Dalam rangka untuk mengetahui kualitas pelayanan publik, maka Dinas Perhubungan Kota Samarinda melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, yaitu Pelayanan Uji Kendaraan (berkala), dengan hasil mendapatkan nilai “**Baik**”

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner elektronik yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Samarinda yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya, Adapun unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu pelaksanaan, persyaratan dan sistem, mekanisme dan prosedur.

Pengolahan Data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan di peroleh hasil sebagai berikut :

Tabel 21
Hasil Analisis Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 Pada UPTD Pengujian Kendaraaan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Samarinda

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3.127	3.17	3.113	3.813	3.253	3.35	3.263	3.898	3.325
Kategori	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik
IKM Unit Layanan	84,18 (B atau Baik)								



1.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perhubungan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategi yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Selain Sasaran utama Dinas Perhubungan Kota Samarinda menetapkan Sasaran tambahan sebagai Sasaran Pendukung pada Program Kegiatan Rutin.

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah :

- **Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan**
Indikator : *Kinerja lalu lintas kabupaten/kota*
- **Meningkatnya kinerja dan pelayanan perangkat Daerah**
Indikator : *Persentase capaian kinerja program perangkat Daerah*

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Indikator tersebut adalah indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan yang akan diukur setiap tahunnya. Adapun analisis pengukuran target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan

Makna Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan adalah suatu upaya untuk meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan yang berkualitas baik dan berkuantitas memadai yang saling terkoneksi serta mengedepankan keselamatan dan responsif gender. Dengan meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perhubungan maka diharapkan kebutuhan masyarakat terhadap jasa sarana prasarana perhubungan akan terpenuhi sehingga masyarakat merasa nyaman, aman dan selamat dalam menggunakan sarana prasarana Perhubungan serta akan tercipta kondisi lalu lintas yang tertib, lancar dan berkurangnya kemacetan serta menurunnya angka kecelakaan. Tolok ukur keberhasilan capaian sasaran Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan diukur dengan



Indikator *Kinerja lalu lintas kabupaten/kota*.

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Capaian indikator *Kinerja lalu lintas kabupaten/kota* diuraikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 22
Rincian Kinerja Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4/5*100	(7)
1.	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0.49	0.48	102,08%	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target yang telah ditetapkan adalah angka rasio 0.49 dan terealisasi dengan angka rasio 0.48 dengan begitu maka capaian kinerja dianggap berhasil dengan baik bahkan lebih baik dari target yang telah ditetapkan dibuktikan dengan angka realisasi yang lebih kecil dari angka target yang menandai bahwa capaian kinerja tercapai dengan Sangat baik (102,08%).

Capaian Indikator Kinerja lalu lintas kabupaten/kota dihitung dengan membandingkan volume kendaraan dan kapasitas jalan, yaitu dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{V Ratio (volume kendaraan) / C Ratio (kapasitas jalan)}$$



Tabel 23
Perhitungan indikator kinerja lalu lintas jalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi	Target	Realisasi Tahun 2024			Keterangan
					V	C	V/C Rasio	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan	Kinerja lalu lintas Kabupaten/kota	V/C Rasio	0,49	571.625,67	277.040,21	0,48	0,48 (nilai) masuk ke Tingkat Pelayanan C

Nb : Data uraian Per ruas jalan dijalan Samarinda terlampir pada halaman lampiran

Dari perhitungan tabel diatas Kinerja lalu lintas perkotaan di Kota Samarinda berdasarkan target yang ditetapkan 0,49 (nilai) yaitu **0,48** (nilai) masuk ke **Tingkat Pelayanan C**, yang artinya kondisi arus lalu lintas stabil tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas yang lebih tinggi dengan kecepatan sekurang-kurangnya 60 km/jam, Pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan dan pindah lajur atau mendahului. Kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat dengan tundaan yang masih dapat diterima, yakni lebih dari 15 – 25 detik perkendaraan.

Adapun faktor yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja lalu lintas kabupaten/kota karena infrastruktur yang baik seperti jalan yang terawat dengan baik, bebas dari lubang dan memiliki permukaan yang halus sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan keamanan berkendara. Rambu dan marka jalan yang terlihat membantu pengemudi dalam mengambil keputusan yang tepat saat berkendara. Meningkatnya kesadaran penggunaan jalan tentang pentingnya keselamatan dan aturan berlalu lintas dapat mengurangi tingkat kecelakaan. Adanya kampanye keselamatan yang efektif dapat mempengaruhi perilaku pengemudi dan pejalan kaki untuk lebih mematuhi aturan lalu lintas.

Indikator kinerja lalu lintas merupakan indikator negatif yang menyatakan bahwa semakin kecil angka maka semakin baik capaian kinerjanya, meskipun di beberapa titik ruas jalan masih terdapat kondisi yang kurang baik dengan kepadatan kendaraan yang menyebabkan kemacetan yang disebabkan oleh beberapa faktor dan kondisi tertentu seperti kondisi jam – jam sibuk mobilitas di jalan dan kondisi cuaca alam banjir dll.

Pada sistem jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder, tingkat pelayanan yang diinginkan pada arus jalan sekurang-kurangnya poin “C” Sesuai dengan Permenhub Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Tingkat Pelayanan	Karakteristik Lalu Lintas	Nilai V/C Ratio
A	Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecamatan yang diinginkan tanpa hambatan	0,00 - 0,20
B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup dalam memilih kecepatan	0,20 – 0,44
C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan	0,45 – 0,74
D	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dikendalikan	0,75 – 0,84
E	Volume lalu lintas mendekati/berada pada kapasitas, arus tidak stabil, kecepatan terkadang terhenti.	0,85 – 1,00
F	Arus yang dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume dibawah kapasitas. Antrian panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar.	>1,00

Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja dan pelayanan perangkat Daerah

Selain sasaran utama pada Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2021 – 2026 Dinas Perhubungan Kota Samarinda menetapkan 1 (satu) sasaran tambahan sebagai sasaran Pendukung pada Program Kegiatan Rutin, Sasaran tersebut adalah Meningkatnya kinerja dan pelayanan perangkat Daerah, Makna Meningkatnya kinerja dan pelayanan perangkat Daerah adalah suatu kondisi meningkatnya kinerja dan pelayanan perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Samarinda kepada masyarakat khususnya masyarakat pengguna jasa perhubungan. Tolok ukur capaian Sasaran Meningkatnya kinerja dan pelayanan perangkat daerah Dinas Perhubungan Kota Samarinda diukur dengan Indikator Persentase capaian kinerja program Dinas Perhubungan.

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Capaian indikator Indeks pelayanan prima diuraikan dalam Tabel sebagai berikut :



Tabel 23
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5/4*100	(7)
1.	Meningkatnya kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program	100 %	99,24%	99,24 %	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan capaian realisasi 100 % (seratus persen), Pada tahun 2024 Indikator Persentase capaian kinerja program ditetapkan target sebesar 100% dan target tersebut dapat tercapai dengan baik dengan realisasi sebesar 100% dengan begitu maka capaian kinerja yang dicapai adalah 100%, Rumus untuk menghitung Indikator Persentase capaian kinerja program adalah **Capaian program dijumlah dan dibagi jumlah program**, dan pada tahun 2024 rincian perhitungannya adalah sebagai berikut : $96.97\% + 100\% + 100\% + 100\% / 4 = 99,24\%$. Keberhasilan capaian kinerja program didukung oleh pelaksanaan program-program yang dituangkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Program

Dalam sub bab ini akan kami uraikan mengenai capaian kinerja Program, di tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Samarinda menjalankan 4 (empat) program yaitu, Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Program pengelolaan pelayaran dan Program perkeretaapian, Adapun penjelasan capaian Program kami sajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 24
Rincian Pencapaian Indikator Program Tahun 2024

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5/4*100
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	90.00%	87.28 %	96,97
2	Program Penyelenggaraan lalu	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	0.89 Rasio	0.89 Rasio	100

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5/4*100
	lintas dan angkutan jalan (LLAJ)				
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio Konektivitas Angkutan Sungai	1.0 Rasio	1.0 Rasio	100
4	Program pengelolaan perkeretaapian	Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, Adapun analisa Capaian indikator Program kami jelaskan dalam uraian dibawah ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator IKM pada tahun 2024 ditarget dengan angka 90.00% dan realisasi sebesar 87,28% maka dengan begitu capaian kinerja berhasil tercapai 96,97%.

Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan mengukur indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan yang penting dalam mengukur keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung berdasarkan hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah Tim yang di bentuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Adapun data hasil dari pengolahan data SKM dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 25. Hasil Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No	Unit Layanan	Indeks Kepuasan	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Layanan Tata Usaha	87,28 %	Baik
Total IKM		87,28 %	Baik

2. Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dengan indikator Rasio Konektivitas Angkutan Jalan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 0.89 Rasio dan target tersebut terealisasi sebesar 0.89 Rasio maka dengan begitu capaian kinerja berhasil tercapai 100 %, adapun rumus untuk menghitung Rasio konektivitas angkutan jalan adalah **Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota dikali bobot trayek dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota**, dan pada tahun 2024 rincian perhitungannya adalah sebagai berikut : $16 \times 1 / 18 = 0.89$, keberhasilan program dilihat dari ketersediaan trayek angkutan umum yang terlayani dan dibandingkan dengan kebutuhan, dari data rumus dapat dilihat bahwa trayek yang telah tersedia adalah sebanyak 16 trayek sedangkan kebutuhan adalah sebanyak 18 trayek.

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Program Pengelolaan Pelayaran dengan indikator Rasio Konektivitas Angkutan Sungai pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 1,00 Rasio dan target tersebut terealisasi sebesar 1,00 Rasio maka dengan begitu capaian kinerja berhasil tercapai 100 %, adapun rumus untuk menghitung Rasio konektivitas angkutan jalan adalah **Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/kota dikali bobot lintas SDP dibagi jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/kota**, dan pada tahun 2024 rincian perhitungannya adalah sebagai berikut : $5 \times 1 / 5 = 100\%$, keberhasilan program dilihat dari ketersediaan jumlah lintasan penyeberangan yang beroperasi dibandingkan dengan jumlah kebutuhan lintasan, dari data rumus dapat dilihat bahwa lintasan penyeberangan yang telah tersedia adalah sebanyak 5 lintasan sedangkan kebutuhan adalah sebanyak 5 Lintasan.

4. Program pengelolaan perkeretaapian

Program pengelolaan perkeretaapian dengan indikator **Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian tersedia** pada tahun 2024 ditetapkan target sebanyak 1 (satu) dokumen dan target tersebut terealisasi sebanyak 1 (satu) dokumen yaitu dokumen Pra study kelayakan jaringan jalur rel kereta api dalam kota Samarinda, maka dengan begitu capaian kinerja berhasil tercapai 100 %, pada program pengelolaan perkeretaapian masih dalam tahapan penyusunan dokumen rencana induk perkeretaapian, dan pada tahun - tahun berikutnya akan kembali dilaksanakan penyusunan dokumen lanjutannya dan akan disusun secara

bertahap.

Dari evaluasi dan analisis yang telah diuraikan di atas dapat dilihat bahwa keberhasilan capaian indikator kinerja program didukung oleh pelaksanaan kegiatan - kegiatan yang tepat dan sesuai kebutuhan, meskipun belum semua kegiatan terlaksana secara maksimal namun target dapat terealisasi dengan baik dan untuk tahun - tahun berikutnya pelaksanaan kegiatan pendukung capaian program akan dilaksanakan lebih maksimal lagi guna tercipta kinerja lalu lintas yang semakin baik.

2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya disajikan dalam tabel perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada 4 (empat) tahun terakhir sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 26
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/kota	0.55	0.55	100	0.53	0.49	100	0.51	0.49	104,08	0.49	0.48	102,08
2.	Persentase capaian kinerja program	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,24%	99,24%

Berdasarkan data pada tabel diatas, perbandingan capaian pada 4 tahun terakhir jika dilihat dari realisasi capaiannya Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah memenuhi target dengan kategori Sangat Baik. Hal ini dapat terjadi karena adanya dukungan anggaran yang cukup memadai dibeberapa kegiatan serta di dukung oleh SDM yang dapat bekerja secara optimal serta koordinasi dan kerja sama yang baik dan saling bersinergi baik dilingkungan internal maupun eksternal Dinas Perhubungan Kota Samarinda.



3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Pada Sub bab ini mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 27
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir 2026	Capaian terhadap Target 2024	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=5/6*100
1.	Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten /Kota	Rasio	0,48	0,45	102,08	106,67
2.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	Persentase	99,24	100	99,24	99,24

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun keempat Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda dari 2 Sasaran indikator kinerja telah memenuhi target jangka panjang menengah Renstra.

4. REALISASI KINERJA MENGACU PADA STANDAR NASIONAL/LAINNYA

Pada sub bab ini membandingkan realisasi kinerja tahunan dengan standar nasional/lainnya.

Tabel 28
Realisasi Kinerja Mengacu Pada Standar Nasional/Lainnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=5/6*100
-	Nihil	-	-	-	-	-

Hasil realisasi kinerja belum dapat dibandingkan dengan realisasi nasional, karena ditingkat nasional tidak tersedia data sesuai indikator tersebut. Adapun tabel Sasaran Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 – 2024 terlampir.

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Dalam rangka untuk mencapai keberhasilan Kinerja Indikator Sasaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda tentunya mengalami hal – hal yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun analisis penyebab keberhasilan/kegagalan adalah sebagai berikut :

Tabel 29
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Ketersedian Sarana dan Prasarana Perhubungan	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten /Kota	0,49	0,48	102,08	• Tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan dalam kondisi baik dan memadai serta memenuhi standar keselamatannya • Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan infrastruktur yang baik seperti jalan yang terawat dengan baik, bebas dari

						lubang dan memiliki permukaan yang halus sehingga dapat meningkatkan kelancaran dan keamanan berkendara.
2.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%	99,24	99,24	Didukung oleh SDM yang memadai yang bekerja secara optimal, berkoordinasi dan kerja sama yang baik serta saling bersinergi dengan baik dilingkungan internal maupun eksternal Dinas Perhubungan dan didukung anggaran yang sudah cukup memadai di beberapa kegiatan

6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi merupakan kemampuan untuk menggunakan sumber daya secara optimal, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan meminimalkan pemborosan dan biaya. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dalam pencapaian hasil tersebut menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Berikut efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

6.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi SDM antara lain Kualitas SDM (Pendidikan, pelatihan, pengalaman), Struktur Organisasi (tugas, wewenang, tanggung jawab), kepemimpinan dan manajemen, komunikasi dan koordinasi.

Kualitas sumber daya manusia sangat memiliki pengaruh terhadap kemajuan dan kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Berdasarkan tabel dibawah ini Dinas Perhubungan Kota Samarinda hanya di dukung oleh 88 orang ASN (PNS & PPPK), sedangkan kebutuhan personil ASN berjumlah 335 Orang. hal ini berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Tabel 30
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

RENTANG UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH TOTAL
	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	
(1)	(2)	(3)	(4)
< 24	0	0	0
25 - 34	3	0	3
35 - 44	17	7	24
45 - 54	43	7	50
> 55	10	1	11
JUMLAH	73	15	88

6.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran merujuk pada proses evaluasi untuk mengetahui sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan secara optimal, dengan memperhatikan rasio antara hasil yang dicapai dan biaya yang dikeluarkan. Dengan kata lain efisiensi dalam konteks pengelolaan anggaran mencakup bagaimana dana digunakan untuk mencapai hasil maksimal dengan sumber daya minimal.

Dalam pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)



Tabel 31
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten /Kota	0,49	0,48	102,08	58.312.291.971	57.668.557.430	98,90	3,25
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100	99,24	99,24	49.137.581.583	48.063.561.753	97,81	1,41

Berdasarkan tabel diatas analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana.

7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum program/kegiatan yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda sudah berpedoman pada perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan pada RPJMD, maupun Renstra Dinas Perhubungan. Dimana program/kegiatan tersebut sudah menunjang tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Dinas Perhubungan Kota Samarinda pada tahun 2024 menetapkan 4 Program dan 23 Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja. Berdasarkan data capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2024 pada program dan kegiatan secara langsung mencapai target kinerja pada indikator-indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana anggaran sebesar Rp. 107.449.873.554,- dengan serapan sebesar Rp. 105.732.119.183,- atau terdapat efisiensi sebesar 1.6 % yaitu sebesar Rp. 1.717.754.371,-

Adapun keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- Didukung oleh SDM yang memadai yang bekerja secara optimal, berkoordinasi dan



kerja sama yang baik serta saling bersinergi.

- Terdapat konsistensi dalam implementasi program dan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.

Tabel 32
Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tingkat V/C Ratio Di Jalan Kota	VC Ratio di Jalan Kota	0,49	0,48	102,08	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	52.349.291.971	51.774.364.889	98,90
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/ Kota	45.907.032.471	45.485.802.201	99,08
						Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe-C	0	0	0,00
						Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	3.017.259.500	2.916.096.600	96,65
						Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.625.000.000	1.600.064.450	98,47
						Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab./Kota	550.000.000	547.956.050	99,63
						Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	50.000.000	49.999.300	100,00
						Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	450.000.000	441.157.460	98,03
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	100.000.000	93.931.175	93,93

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	550.000.000	549.515.493	99,91
						Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	100.000.000	89.842.160	89,84
						Program Pengelolaan Pelayaran	5.163.000.000	5.096.499.581	98,71
						Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota	100.000.000	99.799.800	89,84
						Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	100.000.000	92.980.000	92,98
						Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau	500.000.000	490.730.000	98,15
						Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	4.463.000.000	4.412.989.781	98,88
						Program Pengelolaan Perkeretaapian	800.000.000	797.692.960	99,71
						Penetapan rencana induk Perkeretaapian	800.000.000	797.692.960	99,71

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100	99,24	99,24	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	49.137.581.583	48.063.561.753	97,81
						Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	200.000.000	197.560.890	98,78
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.431.581.382	20.962.146.092	97,81
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	873.006.000	867.990.050	99,43
						Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	435.000.000	430.700.000	99,01
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.139.759.542	24.653.439.017	98,07
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.058.234.659	951.725.704	89,94



Gambar 2. Dokumentasi dalam Pencapaian Kinerja



Ruang ATCS



Pemasangan Rambu



Pemasangan Rambu



Pemasangan Rambu



Pemasangan LPJU



Kegiatan Dermaga Mahakam Ilir



Kegiatan Dermaga Mahakam Ulu



Kegiatan Dermaga Mahakam Ulu



Kegiatan FGD Trayek Angkutan Massal



Ruang Uji Kendaraan Bermotor



Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor



Loket Pendaftaran Uji Kendaraan Bermotor



B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran belanja Dinas Perhubungan Kota Samarinda sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2024 (DPA-P) Sebesar Rp. 107.449.873.554,-. Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan data pada tabel berikut ini :

Tabel 33
Realisasi Anggaran Berdasarkan DPA-P Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	49.137.581.583,00	48.063.561.753,00	97,81%
-	Perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	200.000.000,00	197.560.890,00	98,78%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	99.444.790,00	99,44%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	48.206.300,00	96,41%
3	Evaluasi kinerja perangkat Daerah	50.000.000,00	49.909.800,00	99,82%
-	Administrasi keuangan perangkat daerah	21.431.581.382,00	20.962.146.092,00	97,81%
4	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	13.072.846.930,00	12.784.482.558,00	97,79%
5	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	8.319.171.952,00	8.138.101.084,00	97,82%
6	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	39.562.500,00	39.562.450,00	100,00%
-	Administrasi umum perangkat daerah	873.006.000,00	867.990.050,00	99,43%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	61.000.000,00	58.439.750,00	95,80%
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100.000.000,00	99.700.000,00	99,70%
9	Penyediaan bahan logistik kantor	18.060.000,00	17.850.000,00	98,84%
10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	290.075.000,00	288.141.300,00	99,33%



No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Fasilitasi kunjungan tamu	53.872.000,00	53.860.000,00	99,98%
12	Peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	349.999.000,00	349.999.000,00	100,00%
-	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	435.000.000,00	430.700.000,00	99,01%
13	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	415.000.000,00	410.700.000,00	98,96%
14	Pengadaan mebel	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
-	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	25.139.759.542,00	24.653.439.017,00	98,07%
15	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.009.949.542,00	24.523.629.017,00	98,06%
16	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	129.810.000,00	129.810.000,00	100,00%
-	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.058.234.659,00	951.725.704,00	89,94%
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	224.000.000,00	195.017.500,00	87,06%
18	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	580.414.659,00	504.212.814,00	86,87%
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	24.850.000,00	99,40%
20	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	37.320.000,00	36.799.978,00	98,61%
21	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	191.500.000,00	190.845.412,00	99,66%
II.	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	52.349.291.971,00	51.774.364.889,00	98,90%



No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	45.907.032.471,00	45.485.802.201,00	99,08%
23	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	42.952.835.641,00	42.593.612.409,00	99,16%
24	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	0,00	0,00	0,00%
25	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	2.954.196.830,00	2.716.054.830,00	91,94%
-	Pengelolaan terminal penumpang tipe C	0,00	0,00	0,00%
26	Pembangunan gedung terminal Tipe C	0,00	0,00	0,00%
-	Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	3.017.259.500,00	2.916.096.600,00	96,65%
27	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	3.017.259.500,00	2.916.096.600,00	96,65%
-	Pengujian berkala kendaraan bermotor	1.625.000.000,00	1.600.064.450,00	98,47%
28	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	500.000.000,00	497.941.700,00	99,59%
29	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	75.000.000,00	61.018.000,00	81,36%
30	Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	300.000.000,00	295.995.900,00	98,67%
31	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
32	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	700.000.000,00	695.108.850,00	99,30%
33	Penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor	0,00	0,00	0,00%



No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	550.000.000,00	547.956.050,00	99,63%
34	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.320.000,00	99,32%
35	Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	200.000.000,00	199.377.500,00	99,69%
36	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.631.200,00	99,26%
37	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	199.627.350,00	99,81%
-	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.999.300,00	100,00%
38	Pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin	50.000.000,00	49.999.300,00	100,00%
-	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	450.000.000,00	441.157.460,00	98,03%
39	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi	350.000.000,00	344.999.610,00	98,57%
40	Peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ	50.000.000,00	46.157.850,00	92,32%
41	Pelaksanaan pengawasan melalui uji petik terhadap unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
-	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	100.000.000,00	93.931.175,00	93,93%



No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42	Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	100.000.000,00	93.931.175,00	93,93%
43	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00%
-	Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	550.000.000,00	549.515.493,00	99,91%
44	Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	400.000.000,00	399.519.243,00	99,88%
45	Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	150.000.000,00	149.996.250,00	100,00%
-	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah/kota	100.000.000,00	89.842.160,00	89,84%
46	Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100.000.000,00	89.842.160,00	89,84%
III.	Program Pengelolaan Pelayanan	5.163.000.000,00	5.096.499.581,00	98,71%
47	Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota	100.000.000,00	99.799.800,00	99,80%
48	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan kabupaten/kota	100.000.000,00	99.799.800,00	99,80%



No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	100.000.000,00	92.980.000,00	92,98%
49	Pengendalian dan pengawasan jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	100.000.000,00	92.980.000,00	92,98%
-	Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau	500.000.000,00	490.730.000,00	98,15%
50	Pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau	500.000.000,00	490.730.000,00	98,15%
-	Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	4.463.000.000,00	4.412.989.781,00	98,88%
51	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	100.000.000,00	99.753.568,00	99,75%
52	Pembangunan dermaga sungai dan danau	3.538.000.000,00	3.494.205.413,00	98,76%
53	Pemeliharaan dermaga sungai dan danau	750.000.000,00	744.139.800,00	99,22%
54	Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau penyeberangan Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	75.000.000,00	74.891.000,00	99,85%
IV.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	800.000.000,00	797.692.960,00	99,71%
-	Penetapan rencana induk perkeretaapian	800.000.000,00	797.692.960,00	99,71%
55	Pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian	800.000.000,00	797.692.960,00	99,71%
T o t a l		107.449.873.554,00	105.732.119.183,00	98,40%



BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perhubungan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda tahun 2021 – 2026 dan dokumen perencanaan lainnya.

LKjIP Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. sebagai instansi sektor perhubungan Dinas Perhubungan Kota Samarinda berusaha memaksimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun anggaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta berusaha untuk memanfaatkan sumber daya tersebut dengan efektif dan efisien, meskipun demikian dinas perhubungan berusaha untuk bertanggung jawab mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah menetapkan sebanyak 2 (dua) Tujuan dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan 2 (Dua) Sasaran dengan 2 (dua) indikator Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana kinerja tahun 2024 dan dokumen perjanjian kinerja yang ingin dicapai. Secara rinci dapat di jelaskan sebagai berikut :

No	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja	Predikat
1.	Meningkatnya Aksesibilitas Inter Dan Antar Wilayah Kota	1	100,12 %	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	1	68,72 %	Sedang
3.	Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	1	102,08 %	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	1	99,24 %	Sangat Tinggi



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 indikator tersebut secara umum Dinas Perhubungan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan predikat sangat tinggi dan 1 indikator dengan predikat sedang. Dalam tahun anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kinerja pada dinas perhubungan kota samarinda dalam rangka mencapai target kinerja telah dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kota samarinda.

Dengan adanya kerja sama semua unsur yang terkait (Bidang Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Prasarana, Bidang Keselamatan dan Bidang Angkutan di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Samarinda) dalam mengumpulkan informasi data yang diperlukan, maka LKJIP ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2024 ini, dengan harapan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai tolok ukur, media evaluasi, monitoring dan laporan data/informasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang dan juga digunakan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan dan kinerja tahun-tahun berikutnya.

Lampiran- Lampiran

Lampiran I
Perjanjian Kinerja
Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Tahun 2024



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan MT. Haryono, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda
Kalimantan Timur Kode Pos 75124

<https://dishub.samarinda.go.id>

Email : dishub@samarindakota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HMT MANALU, S.SiT, M.Sc
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SAMARINDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : ANDI HARUN
Jabatan : WALIKOTA SAMARINDA

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 05 Januari 2024

Pihak Kedua,

ANDI HARUN

Pihak Pertama,

HMT MANALU, S.SiT, M.Sc
NIP. 19770328 200012 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	Persentase Capaian Kinerja Program Dinas Perhubungan	100 %
2	Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	0,49

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 46.330.558.201
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 51.548.670.891
3. Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 4.625.000.000
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp 800.000.000
JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2024	Rp 103.304.229.092

Samarinda, 05 Januari 2024

Pihak Kedua,

ANDI HARUN

Pihak Pertama,

HMT MANALU, S.SiT, M.Sc
NIP. 19770328 200012 1 001

Lampiran II

Perjanjian Kinerja Perubahan

Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Tahun 2024



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan MT. Haryono, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda
Kalimantan Timur Kode Pos 75124

<https://dishub.samarinda.go.id>

Email : dishub@samarindakota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HMT MANALU, S.SiT, M.Sc
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SAMARINDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : RUSMADI
Jabatan : Plt. WALIKOTA SAMARINDA

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 09 Oktober 2024

Pihak Kedua,


RUSMADI

Pihak Pertama,


HMT MANALU, S.SiT, M.Sc
NIP. 19770328 200012 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	Persentase Capaian Kinerja Program Dinas Perhubungan	100 %
2	Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	0.49

PROGRAM

ANGGARAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	49.068.835.703
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	52.349.291.971
3. Program Pengelolaan Pelayaran	Rp	5.163.000.000
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp	800.000.000
JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2024	Rp	107.381.127.674

Samarinda, 09 Oktober 2024

Pihak Kedua,


RUSMADI

Pihak Pertama,


HMT MANALU, S.SiT, M.Sc
NIP. 19770328 200012 1 001

Lampiran III

Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategis
Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020 – 2024

Lampiran
Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategis
Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020 – 2024
(Permenhub Nomor 80 Tahun 2020)

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Terwujudnya Konektivitas Nasional	• Optimalisasi simpul transportasi eksisting • Pembangunan simpul transportasi baru • Pembagian komoditi barang ekspor impor pada pelabuhan di seluruh Indonesia • Reaktivasi jalur moda transportasi • Sinergitas angkutan umum dengan moda transportasi lokal • Penguatan distribusi barang di seluruh wilayah Indonesia • Penguatan jaringan layanan moda eksisting terhadap simpul utama dan kawasan rawan bencana, perbatasan, terluar, dan terpencil • Peningkatan aksesibilitas melalui perluasan jaringan layanan moda menuju simpul utama dan kawasan rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil • Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi local • Pengembangan kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan diwilayah aglomerasi	• Penguatan Jaringan Transportasi Eksisting • Perluasan jaringan layanan transportasi • Penguatan transportasi antar moda dan multi moda • Pembangunan fasilitas alih moda dan multi moda • Penerapan Traffic Demand Management pada semua layanan transportasi • Optimalisasi rute layanan distribusi angkutan barang di seluruh wilayah Indonesia • Pembangunan pergudangan pada simpul utama transportasi • Peningkatan aksesibilitas menuju KEK, KSPN dan PSN • Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi local • Penempatan Pejabat Fungsional sesuai kebutuhan pembangunan dan pengembangan simpul transportasi • Penyiapan kompetensi keahlian professional pada jabatan fungsional pembangunan dan pengembangan serta pengoperasian simpul transportasi di seluruh wilayah Indonesia • Perumusan tindak lanjut pembangunan berkelanjutan setelah operasional simpul transportasi seluruh wilayah Indonesia. • Mendorong pembentukan Badan Pengelolaan Transportasi Perkotaan. • Kajian peraturan yang mendukung terwujudnya kekuatan multimoda.

			• Mendorong peluang kerja sama dengan Badan Usaha/swasta untuk melaksanakan proyek potensial.
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	• Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan transportasi • Optimalisasi SDM pelayanan sarana dan prasarana • Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja OTP pada pelayanan moda transportasi • Penerapan pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan • Penguatan skema pendanaan pengembangan sistem transportasi perkotaan • Mendukung Kinerja logistik nasional	• Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi • Penyusunan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan layanan pengguna jasa transportasi • Penyusunan program pengembangan SDM pelaku jasa layanan transportasi untuk memenuhi harapan pengguna jasa transportasi sesuai standar pelayanan yang diberlakukan • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan • Mengembangkan prototipe sistem informasi transportasi sebagai inovasi teknologi layanan yang mampu menyajikan kondisi real time OTP • Dukungan terhadap transportasi ramah lingkungan gender, difabel, dan lansia • Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana • Evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada untuk mencari akar permasalahan delay yang terjadi pada sistem layanan transportasi • Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (Buy The Service) • Standarisasi kinerja pada 7 pelabuhan utama (kedalaman, panjang dermaga, kinerja bongkar muat) • Pengembangan rute jaringan saling terhubung (loop) distribusi domestic • Pengembangan sistem informasi logistic (e-logistic) • Pengembangan angkutan multimoda dan antarmoda ke kawasan hinterland

			• Peremajaan kapal niaga dengan mengutamakan peran galangan kapal dalam negeri • Penguatan keterpaduan angkutan tol laut dengan moda lain (jembatan udara dan perintis darat)
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi	• Penegakan hukum atas aturan yang diberlakukan • Pemanfaatan teknologi untuk penyusunan database kecelakaan darat, laut, udara dan perkotaan, KIR online, travel data recording • Pengembangan aplikasi pengaduan pelayanan transportasi untuk menunjang keamanan dan keselamatan transportasi • Control kelengkapan keselamatan dan keamanan moda angkutan • Pembatasan usia kendaraan layanan moda angkutan umum • Penyediaan fasilitas ZoSS (Zona Selamat Sekolah) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan taman edukasi • Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian • Pengembangan system informasi terkait security awareness di setiap lokasi simpul utama transportasi • Pemenuhan SDM keselamatan dan	• Penegakan hukum • Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan • Pembatasan usia sarana prasarana transportasi • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan • Peningkatan monitoring dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi • Pemanfaatan teknologi keamanan dan keselamatan transportasi • Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan • Edukasi keselamatan transportasi • Penyusunan dan penerapan SOP keamanan di setiap lokasi simpul utama transportasi • Peningkatan sertifikasi sarana dan prasarana kereta api • Perbaikan dan pengembangan SOP keselamatan untuk setiap moda

		keamanan transportasi darat, KA, Laut, Udara	
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	• Peningkatan kualitas formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat dinamika kondisi transportasi • Peningkatan pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang telah ditetapkan	• Pengendalian kualitas formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat dinamika kondisi transportasi • Jangka waktu proses pengusulan kebijakan hingga menjadi keputusan atau peraturan menteri perhubungan • Pelaksanaan kebijakan bidang transportasi yang telah ditetapkan dalam keputusan atau peraturan menteri perhubungan • Peningkatan EST (Environmentally Sustainable Transportation) / transportasi berkelanjutan untuk setiap kota metropolitan dan kota besar • Efisiensi energi dan pemanfaatan energi ramah lingkungan • Penyusunan SOP layanan transportasi ramah lingkungan
5.	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	• Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang link and match dengan kebutuhan industry dan pengembangan sarana prasarana transportasi • Pembentukan SDM yang berkarakter dan berintegrasi • Peningkatan relevansi dan daya saing lembaga diklat SDM transportasi • Optimalisasi peram kelembagaan (BPSDM Perhubungan) dalam pengembangan SDM transportasi	• Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni • Peningkatan Link and Match SDM Transportasi • Penguatan SDM Transportasi Berbasis Wilayah dan Kemasyarakatan • Peningkatan Pendidikan Agama, Karakter dan Budi Pekerti • Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai – nilai agama • Peningkatan Pendidikan Kewarganegaraan dan Bela Negara • Melakukan reformasi di sistem pendidikan dan pelatihan vokasi disektor Transportasi yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi • Peningkatan kualitas dan pengembangan penelitian (Research & Development)

			• Transformasi kelembagaan Balai/UPT BPSDM Perhubungan menuju BLU/BHMN • Peningkatan peran BPSDM Perhubungan dalam pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan SDM transportasi
6.	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan	• Pembangunan berkelanjutan yang menjamin keberlanjutan kehidupan ekonomi dan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya	• Menghitung Nilai Indeks berkelanjutan (sustainability index) pada sarana dan/atau prasarana transportasi sebagai acuan dan feedback bagi peningkatan kualitas sistem transportasi • Perumusan kebijakan adaptasi dan/atau miigasi perubahan iklim di sektor transportasi serta pelaporan rencana aksi penurunan emisi GRK di sektor tranportasi Melakukan Pemetaan Dan Intensifikasi Dokumen Lingkungan
7.	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian	• Mengoptimalkan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja Dinas Perhubungan	• Melakukan reuiu Renstra dan Renja Kemenhub secara kontinu • Melakukan Evaluasi Kemanfaatan Terhadap Rencana Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi • Pengembangan dan penyempurnaan untuk monitor capaian kinerja seluruh pegawai Dinas Perhubungan • Pengembangan sistem e-monev untuk penilaian kinerja Dinas Perhubungan • Mendorong peningkatan tindak lanjut terhadap rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA)
8.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Baik	• Optimalisasi reformasi regulasi dalam pembentukan ataupun	• Penertiban paket-paket deregulasi perijinan di lingkungan Dinas Perhubungan

		pengaturan kembali tata kelembagaan di Dinas Perhubungan • Pemanfaatan teknologi dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penegakan hukum secara konsisten • Penyempurnan SOP layanan transportasi • Pembentukan ataupun pengaturan kembali tata kelembagaan di lingkungan Dinas Perhubungan • Penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan	• Peningkatan pemahaman dan kesadaran pengguna dalam penerapan SOP layanan transportasi • Penggunaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan transportasi baik komersil maupun non komersil • Pelaksanaan edukasi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi • Peningkatan pengelolaan / manajemen transportasi untuk mendukung smart city pada kota besar dan metropolitan Peraturan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Dinas Perhubungan
--	--	---	---

Lampiran IV
Data V/C Rasio Ruas Jalan Kota Samarinda
Tahun 2024

ATA V/C RASIO PADA RUAS JALAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi	Target	Realisasi Tahun 2024			Keterangan
					V	C	V/C Rasio	
1	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan	Kinerja lalu lintas Kabupaten/ kota	V/C Rasio	0,49	571.625,67	277.040,21	0,48	0,48 (nilai) masuk ke Tingkat Pelayanan C

NO	NAMA JALAN	STATUS JALAN	PANJANG RUAS (m)	LEBAR LAJUR EFEKTIF (m)	LEBAR JALUR (m)	LEBAR BAHU (m)	MEDIAN (m)	KAPASITAS JALAN (C)	VOLUME (smp/Jam)	V/C RATIO	LOS VC RASIO
1	Jalan H.A.M. Rifaddin (T)	Provinsi	4.734,00	5	20	0	0	3.149,15	1.213,00	0,39	B
2	Jalan H.A.M. Rifaddin (B)	Provinsi	4.735,00	5	20	0	0	3.149,15	1.324,00	0,42	B
3	Jalan Harun Nafsi 1 (S)	Provinsi	2.200,00	3,2	6,4	0	0	2.858,80	1.463,00	0,51	C
4	Jalan Harun Nafsi 1 (U)	Provinsi	2.200,00	3,2	6,4	0	0	2.858,80	1.349,00	0,47	C
5	Jalan Harun Nafsi 2	Provinsi	2.500,00	4,6	9,2	0	0	2.181,89	705,00	0,32	B
6	Jalan Sukarno-Hatta	Nasional	11.442,00	3,5	7	0	0	2.229,32	663,00	0,30	B
7	Jalan Samarinda-Sanga Sanga	Nasional	9.888,00	3,5	7	2	1	2.753,26	753,00	0,27	B
8	Jalan Ampera (B)	Nasional	3.016,00	3,5	14	0	0	2.853,84	1.033,00	0,36	B
9	Jalan Ampera (T)	Nasional	3.016,00	3,5	14	0	0	2.853,84	978,00	0,34	B
10	Jalan Trikora (T)	Nasional	1.620,00	3,5	14	0	3	2.915,88	1.076,00	0,37	B
11	Jalan Trikora (B)	Nasional	1.620,00	3,5	14	0	3	2.915,88	1.148,00	0,39	B
12	Jalan Otto Iskandardinata	Nasional	936,00	3,5	7	0	0	1.944,73	1.193,00	0,61	C
13	Jalan Gajah Mada 1 (B)	Nasional	737,00	3,5	7	0	1,5	2.915,88	1.551,00	0,53	C
14	Jalan Gajah Mada 1 (T)	Nasional	737,00	3,5	7	0	1,5	2.915,88	1.716,00	0,59	C
15	Jalan Gajah Mada 2 (B)	Nasional	320,00	3,5	7	0	1,5	2.915,88	2.169,00	0,74	C
16	Jalan Gajah Mada 2 (T)	Nasional	320,00	3,5	7	0	1,5	2.915,88	2.107,00	0,72	C
17	Jalan Gajah Mada 3 (B)	Nasional	317,00	3,5	7	0	1,5	2.915,88	1.607,00	0,55	C
18	Jalan Gajah Mada 3 (T)	Nasional	317,00	3,5	7	0	1,5	2.915,88	1.514,00	0,52	C
19	Jalan Yos Sudarso 1 (B)	Nasional	230,00	3,5	7	1,5	2,5	3.039,96	1.052,00	0,35	B
20	Jalan Yos Sudarso 1 (T)	Nasional	230,00	3,5	7	1,5	2,5	3.039,96	1.106,00	0,36	B
21	Jalan Yos Sudarso 2 (B)	Nasional	360,00	3,5	7	1,5	2,5	3.039,96	1.073,00	0,35	B
22	Jalan Yos Sudarso 2 (T)	Nasional	360,00	3,5	7	1,5	2,5	3.039,96	1.120,00	0,37	B
23	Jalan Yos Sudarso 3 (B)	Nasional	200,00	3,5	7	1,5	2,5	3.039,96	1.080,00	0,36	B
24	Jalan Yos Sudarso 3 (T)	Nasional	200,00	3,5	7	1,5	2,5	3.039,96	1.126,00	0,37	B
25	Jalan Yos Sudarso 4 (B)	Nasional	200,00	3,5	7	1,5	2,5	3.039,96	2.239,00	0,74	C
26	Jalan Yos Sudarso 4 (T)	Nasional	200,00	3,5	7	1,5	2,5	3.039,96	2.411,00	0,79	D
27	Jalan P.Hidayatullah 1	Kota	250,00	5,75	5,75	0	0	2.948,14	1.013,00	0,34	B
28	Jalan P.Hidayatullah 2	Kota	100,00	5,75	5,75	0	0	2.948,14	1.041,00	0,35	B
29	Jalan P.Hidayatullah 3	Kota	100,00	5,75	5,75	0	0	2.948,14	1.012,00	0,34	B
30	Jalan P.Hidayatullah 4	Kota	250,00	5,75	5,75	0	0	2.948,14	1.023,00	0,35	B
31	Jalan Sultan Hasanuddin (A)	Kota	1.800,00	3,4	13,6	0	3	2.729,76	606,00	0,22	B
32	Jalan Sultan Hasanuddin	Kota	1.800,00	3,4	13,6	0	3	2.729,76	622,00	0,23	B
33	Jalan Pattimura (A)	Kota	1.821,00	3,4	13,6	0	0	2.853,84	446,00	0,16	A
34	Jalan Pattimura	Kota	1.821,00	3,4	13,6	0	0	2.853,84	463,00	0,16	A
35	Jalan Cipto Mangunkusumo	Kota	9.557,00	4,6	9,2	0	0	1.989,98	477,00	0,24	B

36	Jalan APT Pranoto (A)	Kota	1.850,00	3	18	3,5	3	8.732,75	1.064,00	0,12	A
37	Jalan APT Pranoto	Kota	1.850,00	3	18	3,5	3	8.732,75	930,00	0,11	A
38	Jalan P. Suryanata 1	Provinsi	1.200,00	3,5	7	0	0	2.235,32	1.244,00	0,56	C
39	Jalan P. Suryanata 2 (B)	Provinsi	800,00	3,4	13,6	0	1,5	2.853,84	637,00	0,22	B
40	Jalan P. Suryanata 2 (T)	Provinsi	800,00	3,4	13,6	0	1,5	2.853,84	520,00	0,18	A
41	Jalan P. Suryanata 3 (B)	Provinsi	8.200,00	3,4	13,6	0	1,5	2.977,92	938,00	0,31	B
42	Jalan P. Suryanata 3 (T)	Provinsi	8.200,00	3,4	13,6	0	1,5	2.977,92	1.013,00	0,34	B
43	Jalan P. Antasari 1 (T)	Nasional	700,00	3,4	13,4	0	1,2	2.853,84	2.467,00	0,86	E
44	Jalan P. Antasari 1	Nasional	700,00	3,4	13,4	0	1,2	2.853,84	2.485,00	0,87	E
45	Jalan P. Antasari 2 (T)	Nasional	1.000,00	3,4	13,4	0	1,2	2.853,84	2.286,00	0,80	D
46	Jalan P. Antasari 2	Nasional	1.000,00	3,4	13,4	0	1,2	2.853,84	2.317,00	0,81	D
47	Jalan L. Soeprapto (B)	Provinsi	960,00	3,2	12,8	0	1,5	2.915,88	2.506,00	0,86	E
48	Jalan L. Soeprapto (T)	Provinsi	960,00	3,2	12,8	0	1,5	2.915,88	2.574,00	0,88	E
49	Jalan R.E. Martadinata	Nasional	847,00	7	14	0	2	3.082,15	1.502,00	0,49	C
50	Jalan R.E. Martadinata	Nasional	847,00	7	14	0	2	3.082,15	1.544,00	0,50	C
51	Jalan Ring Road 2 Utara (S)	Provinsi	2.008,00	3,5	7	0	3	2.915,88	860,00	0,29	B
52	Jalan Ring Road 2 Utara (U)	Provinsi	2.008,00	3,5	7	0	3	2.915,88	777,00	0,27	B
53	Jalan Samarinda-Bontang	Nasional	14.415,00	3,8	7,6	3	0	2.726,00	649,00	0,24	B
54	Jalan Sultan Sulaiman	Nasional	9.870,00	3,7	7,4	0	0	2.181,89	815,00	0,37	C
55	Jalan Samarinda-Anggana	Nasional	3.626,00	3,5	7	3	0	2.371,62	878,00	0,37	C
56	Jalan MT.Haryono 1	Provinsi	1.300,00	3,4	6,8	2	0	2.726,00	1.257,00	0,46	C
57	Jalan MT.Haryono 2	Provinsi	1.200,00	3,4	6,8	2	0	2.726,00	1.104,00	0,40	B
58	Jalan Ring Road 1 Selatan (U)	Provinsi	5.653,00	3,4	13,6	1	2,5	3.008,94	766,00	0,25	B
59	Jalan Ring Road 1 Selatan (S)	Provinsi	5.653,00	3,4	13,6	1	2,5	3.008,94	780,00	0,26	B
60	Jalan Teuku Umar 1	Provinsi	650,00	5,2	10,4	0	0	2.426,14	1.817,00	0,75	D
61	Jalan Teuku Umar 2	Provinsi	3.300,00	3,8	7,6	0	0	2.507,92	1.113,00	0,44	B
62	Jalan Untung Surapati 1 (U)	Nasional	200,00	3,5	14	0	2	2.915,88	1.753,00	0,60	C
63	Jalan Untung Surapati 1 (S)	Nasional	200,00	3,5	14	0	2	2.915,88	1.678,00	0,58	C
64	Jalan Untung Surapati 2	Nasional	900,00	5,5	14	0	0	2.110,74	1.432,00	0,68	C
65	Jalan Ir.Sutami (T)	Kota	1.124,00	3,3	13,2	0	1	2.853,84	1.184,00	0,41	B
66	Jalan Ir.Sutami (B)	Kota	1.124,00	3,3	13,2	0	1	2.853,84	1.343,00	0,47	C
67	Jalan Mas Mansyur 1	Provinsi	1.900,00	5	10	0	0	2.181,89	865,00	0,40	B
68	Jalan Mas Mansyur 2	Provinsi	6.500,00	5,5	11	0	0	2.181,89	1.296,00	0,59	C
69	Jalan Slamet Riyadi 1 (U)	Nasional	900,00	3,5	14	0	2	2.915,88	2.227,00	0,76	D
70	Jalan Slamet Riyadi 1 (S)	Nasional	900,00	3,5	14	0	2	2.915,88	2.206,00	0,76	D
71	Jalan Slamet Riyadi 2 (U)	Nasional	800,00	3,5	14	0	2	2.915,88	2.302,00	0,79	D
72	Jalan Slamet Riyadi 2 (S)	Nasional	800,00	3,5	14	0	2	2.915,88	2.210,00	0,76	D
73	Jalan D.I. Panjaitan (S)	Provinsi	3.500,00	3,5	14	1	1	2.946,90	1.825,00	0,62	C
74	Jalan D.I. Panjaitan (U)	Provinsi	3.500,00	3,5	14	1	1	2.946,90	1.808,00	0,61	C
75	Jalan Ahmad Yani 1 (S)	Provinsi	850,00	3,3	13,2	0	1,5	2.915,88	988,00	0,34	B
76	Jalan Ahmad Yani 1 (U)	Provinsi	850,00	3,3	13,2	0	1,5	2.915,88	1.078,00	0,37	B
77	Jalan Ahmad Yani 2 (S)	Provinsi	1.300,00	3,5	14	0	1,5	2.915,88	1.087,00	0,37	B
78	Jalan Ahmad Yani 2 (U)	Provinsi	1.300,00	3,5	14	0	1,5	2.915,88	1.133,00	0,39	B
79	Jalan Ir.Juanda U	Nasional	1.676,00	3,4	13,6	0	1	2.853,84	2.073,00	0,73	C
80	Jalan Ir.Juanda S	Nasional	1.676,00	3,4	13,6	0	1	2.853,84	2.209,00	0,77	D
81	Jalan Moeis Hassan (T)	Provinsi	2.330,00	3,6	7,2	0	0	3.032,52	885,00	0,29	B
82	Jalan Moeis Hassan (B)	Provinsi	2.330,00	3,6	7,2	0	0	3.032,52	871,00	0,29	B
83	Jalan Syahrani Dahlan	Provinsi	1.500,00	7	7	0	0	2.507,92	698,00	0,28	B

84	Jalan Simpang Pasir	Kota	4.881,00	3,4	13,6	0	0	2.181,89	647,00	0,30	B
85	Jalan Stadion Utama (S)	Kota	5.017,00	3,6	14,4	2,5	4	3.290,60	856,00	0,26	B
86	Jalan Stadion Utama (U)	Kota	5.017,00	3,6	14,4	2,5	4	3.290,60	884,00	0,27	B
87	Jalan Lumba-Lumba	Kota	2.034,00	2,8	5,8	1,5	0	1.480,76	653,00	0,44	B
88	Jalan Urip Sumoharjo	Kota	686,00	5	10	0	0	1.404,44	917,00	0,65	C
89	Jalan Jelawat	Kota	692,00	3,4	3,4	0	0	2.729,76	1.153,00	0,42	B
90	Jalan Marsda Abdul Saleh	Kota	345,00	3	6	3	0	1.496,03	897,00	0,60	C
91	Jalan Gurami	Kota	449,00	3	6	0	0	1.404,44	894,00	0,64	C
92	Jalan Pesut	Kota	326,00	3	2	2	0	2.910,92	1.218,00	0,42	B
93	Jalan Kakap	Kota	264,00	3	3	0	0	1.358,64	1.042,00	0,77	D
94	Jalan Biawan	Kota	343,00	5	10	1	0	1.404,44	778,00	0,55	C
95	Jalan Sultan Alimudin	Kota	2.557,00	3,4	6,8	0	0	1.404,44	940,00	0,67	C
96	Jalan Bhayangkara 1	Provinsi	200,00	5	10	0	0,8	3.082,15	1.150,00	0,37	B
97	Jalan Bhayangkara 1	Provinsi	200,00	5	10	0	0,8	3.082,15	1.120,00	0,36	B
98	Jalan Bhayangkara 2	Provinsi	800,00	5	10	0	0	2.507,92	1.164,00	0,46	C
99	Jalan Awang Long 1	Provinsi	250,00	5	10	0	0	2.507,92	1.095,00	0,44	B
100	Jalan Awang Long 2	Provinsi	250,00	5	10	0	0	2.507,92	1.216,00	0,48	C
101	Jalan Awang Long 3	Provinsi	100,00	5	10	0	0	3.149,15	2.145,00	0,68	C
102	Jalan Basuki Rahmat 1	Kota	500,00	4,7	4,7	0	0	3.149,15	1.468,00	0,47	C
103	Jalan Basuki Rahmat 2	Kota	650,00	3,2	6,4	0	1	2.799,24	1.235,00	0,44	B
104	Jalan Basuki Rahmat 2	Kota	650,00	3,2	6,4	0	1	2.799,24	1.081,00	0,39	B
105	Jalan KH.Agus Salim 1	Kota	195,00	5	10	0	0	2.562,44	2.012,00	0,79	D
106	Jalan KH.Agus Salim 2	Kota	259,00	5	10	0	0	2.426,14	1.822,00	0,75	D
107	Jalan KH.Agus Salim 3 (U)	Kota	300,00	6	12	0	0,5	2.799,24	1.754,00	0,63	C
108	Jalan KH.Agus Salim 3 (S)	Kota	300,00	6	12	0	0,5	2.799,24	1.642,00	0,59	C
109	Jalan Gunung Kinibalu 1	Kota	100,00	3,5	7	0	0	2.915,88	1.785,00	0,61	C
110	Jalan Gunung Kinibalu 2	Kota	100,00	3,5	7	0	0	2.915,88	1.687,00	0,58	C
111	Jalan P.Banda 2	Kota	150,00	3,9	7,8	0	0	1.404,44	675,00	0,48	C
112	Jalan P.Suriansyah	Kota	650,00	3,4	6,8	1,5	0	1.450,23	753,00	0,52	C
113	Jalan Mulawarman 1	Kota	250,00	4,5	4,5	1,5	0	3.182,65	1.002,00	0,31	B
114	Jalan Mulawarman 2	Kota	220,00	4,5	4,5	1,5	0	3.182,65	947,00	0,30	B
115	Jalan Mulawarman 3	Kota	140,00	4,5	4,5	1,5	0	3.182,65	1.091,00	0,34	B
116	Jalan Mulawarman 4	Kota	120,00	4,5	4,5	1,5	0	3.182,65	1.039,65	0,33	B
117	Jalan P.Irian 1	Kota	300,00	3,8	7,6	1	0	3.182,65	1.857,00	0,58	C
118	Jalan P.Irian 2	Kota	500,00	3,8	7,6	1	0	3.182,65	1.862,00	0,59	C
119	Jalan P.Samosir 1	Kota	450,00	3,2	3,2	2,5	0	1.526,56	930,00	0,61	C
120	Jalan P.Samosir 2	Kota	350,00	3,2	3,2	2,5	0	1.526,56	981,00	0,64	C
121	Jalan Muso Salim	Kota	650,00	3,2	6,4	0	0	1.358,64	1.122,00	0,83	D
122	Jalan Cut Meutia	Kota	200,00	2,8	5,6	0	0	1.404,44	892,00	0,64	C
123	Jalan P.Banda 1	Kota	150,00	3,9	7,8	0	0	1.404,44	747,00	0,53	C
124	Jalan Jendral Sudirman 1	Kota	250,00	3	3	0	0	2.625,53	950,02	0,36	B
125	Jalan Jendral Sudirman 2	Kota	260,00	3	3	0	0	2.625,53	966,53	0,37	B
126	Jalan Jendral Sudirman 3	Kota	400,00	3	3	0	0	2.511,38	965,01	0,38	B
127	Jalan P.Sulawesi	Kota	190,00	3,4	6,8	0	0	2.853,84	1.227,00	0,43	B
128	Jalan P.Diponegoro 1	Kota	200,00	4,5	4,5	0	0	3.082,15	1.678,00	0,54	C
129	Jalan P.Diponegoro 2	Kota	200,00	4,5	4,5	0	0	3.082,15	1.717,00	0,56	C
130	Jalan P.Diponegoro 3	Kota	200,00	4,5	4,5	0	0	3.082,15	1.765,00	0,57	C
131	Jalan K.H.Khalid 1	Kota	250,00	2,7	2,7	0	0	2.682,61	1.054,00	0,39	B
132	Jalan K.H. Khalid 2	Kota	180,00	2,5	2,5	0	0	2.682,61	1.028,00	0,38	B

133	Jalan Abul Hasan	Kota	400,00	4,5	9	0	0	2.426,14	1.135,00	0,47	C
134	Jalan Veteran	Kota	140,00	3	3	0	0	1.404,44	1.174,00	0,84	D
135	Jalan K.H.Abdul Maritsi	Kota	160,00	3,75	7,5	0	0	2.838,95	882,00	0,31	B
136	Jalan Pelabuhan	Kota	450,00	3,4	6,8	1	0	2.181,89	1.178,00	0,54	C
137	Jalan P.Flores	Kota	300,00	3,4	6,8	0	0	1.404,44	1.135,00	0,81	D
138	Jalan Aminah Syukur 1	Kota	400,00	3,2	6,4	1	0	1.434,97	964,00	0,67	C
139	Jalan Aminah Syukur 2	Kota	200,00	3	6	1	0	1.434,97	1.043,00	0,73	C
140	Jalan Panglima Batur 1	Kota	400,00	4,45	4,45	0	0	3.082,15	1.646,00	0,53	C
141	Jalan Panglima Batur 2	Kota	130,00	4,45	4,45	0	0	3.082,15	1.621,00	0,53	C
142	Jalan Panglima Batur 3	Kota	370,00	4,45	4,45	0	0	3.082,15	1.601,00	0,52	C
143	Jalan P.Kalimantan	Kota	160,00	4,4	8,8	0	0	1.358,64	514,00	0,38	B
144	Jalan Niaga Timur	Kota	420,00	3,8	0,8	0	3	3.149,15	1.176,00	0,37	B
145	Jalan Niaga Utara	Kota	500,00	5,1	5,1	0	1	1.944,73	1.153,00	0,59	C
146	Jalan Niaga Barat	Kota	450,00	3	3	0	0	2.625,53	927,00	0,35	B
147	Jalan Niaga Selatan	Kota	350,00	5,1	5,1	0	0	1.944,73	1.180,00	0,61	C
148	Jalan P.Sebatik	Kota	200,00	5	10	0	0	2.426,14	1.350,00	0,56	C
149	Jalan Imam Bonjol	Kota	600,00	5,5	5,5	0	0	3.149,15	2.251,00	0,71	C
150	Jalan Dermaga	Kota	470,00	3,2	6,4	0	0	2.110,74	1.204,00	0,57	C
151	Jalan Nahkoda	Kota	350,00	3,6	3,6	2	0	3.290,60	1.374,00	0,42	B
152	Jalan Kusuma Bangsa (T)	Kota	560,00	2,7	5,4	0	2	2.682,61	1.231,00	0,46	C
153	Jalan Kusuma Bangsa (B)	Kota	560,00	2,7	5,4	0	2	2.682,61	1.064,00	0,40	B
154	Jalan Arif Rahman Hakim 1	Kota	340,00	3,7	7,2	0	0	2.426,14	1.212,00	0,50	C
155	Jalan Arif Rahman Hakim 2	Kota	350,00	3,7	7,2	0	0	2.426,14	1.285,00	0,53	C
156	Jalan RA. Kartini	Kota	550,00	2,7	5,4	2	0	1.526,56	1.227,00	0,80	D
157	Jalan KH. Ahmad Dahlan	Kota	450,00	7	14	0	0	2.426,14	1.573,00	0,65	C
158	Jalan Abdul Muthalib	Kota	750,00	3,2	6,4	0	0	1.358,64	906,00	0,67	C
159	Jalan Tarmidi	Kota	500,00	3	6	0	0	1.358,64	1.144,00	0,84	D
160	Jalan W.R Supratman	Kota	350,00	3,5	7	0	0	1.404,44	1.202,00	0,86	E
161	Jalan Cokroaminoto	Kota	600,00	2,5	5	0	0	1.404,44	630,00	0,45	C
162	Jalan Bung Tomo 1 (M)	Kota	2.100,00	3,4	13,6	0	3	2.729,76	1.499,00	0,55	C
163	Jalan Bung Tomo 1 (M)	Kota	2.100,00	3,4	13,6	0	3	2.729,76	1.314,00	0,48	C
164	Jalan Bung Tomo 2	Kota	1.200,00	4,7	9,4	0	0	2.765,80	635,00	0,23	B
165	Jalan Kadrie Oening 1 (M)	Kota	1.580,00	5	10	0	0	2.507,92	1.334,00	0,53	C
166	Jalan Kadrie Oening 2	Kota	220,00	3	12	0	0,8	2.682,61	2.175,00	0,81	D
167	Jalan Kadrie Oening 2	Kota	220,00	3	12	0	0,8	2.682,61	2.024,00	0,75	D
168	Jalan Fly Over Juanda	Nasional	600,00	3,2	6,4	0	0	1.404,44	576,00	0,41	B
169	Jalan Siradj Salman 1	Kota	550,00	5,7	11,4	1,5	0	2.253,04	1.320,00	0,59	C
170	Jalan Siradj Salman 2 (M)	Kota	700,00	3	12	0	1,5	2.682,61	1.063,00	0,40	B
171	Jalan Siradj Salman 2 (M)	Kota	700,00	3	12	0	1,5	2.682,61	1.101,00	0,41	B
172	Jalan KS. Tubun	Kota	644,00	2,8	5,6	0	0	1.358,64	1.079,00	0,79	D
173	Jalan KS. Tubun Dalam	Kota	997,00	2,6	5,2	0	0	1.358,64	956,00	0,70	C
174	Jalan Gn. Merapi	Kota	235,00	3,3	6,6	0	0	1.358,64	940,00	0,69	C
175	Jalan Pasundan	Kota	841,00	2,8	5,6	0	0	1.358,64	955,00	0,70	C
176	Jalan Pahlawan	Kota	873,00	5,4	10,8	0	1,5	3.149,15	1.676,00	0,53	C
177	Jalan Pahlawan	Kota	873,00	5,4	10,8	0	1,5	3.149,15	1.428,00	0,45	C
178	Jalan Dr. Sutomo	Provinsi	855,00	3	12	1	0	2.711,15	1.547,00	0,57	C
179	Jalan Dr. Sutomo	Provinsi	855,00	3	12	1	0	2.711,15	1.795,00	0,66	C
180	Jalan M. Yamin	Provinsi	1.515,00	3,4	13,6	0	1	2.853,84	1.132,00	0,40	B
181	Jalan M. Yamin	Provinsi	1.515,00	3,4	13,6	0	1	2.853,84	1.056,00	0,37	B

182	Jalan Perniagaan	Kota	345,00	3,2	6,4	0	0	1.358,64	803,00	0,59	C
183	Jalan A. W. Syahrani	Provinsi	3.487,00	5,7	11,7	3	0	2.371,62	1.039,00	0,44	B
184	Jalan Mayor Jend S. Parman	Provinsi	1.065,00	3,3	13,2	0	1,5	2.915,88	1.211,00	0,42	B
185	Jalan Mayor Jend S. Parman	Provinsi	1.065,00	3,3	13,2	0	1,5	2.915,88	1.276,00	0,44	B
186	Jalan P.M.Noor	Nasional	2.811,00	7,4	14,8	2	0	3.045,49	2.274,00	0,75	D
187	Jalan Kebon Agung	Nasional	1.035,00	3,4	6,8	0	0	1.404,44	625,00	0,45	C
188	Jalan K.H.Wahid Hasyim 1 (M)	Provinsi	1.483,00	3,3	13,2	0	2	2.853,84	1.054,00	0,37	B
189	Jalan K.H.Wahid Hasyim 1 (M)	Provinsi	1.483,00	3,3	13,2	0	2	2.853,84	1.023,00	0,36	B
190	Jalan K.H. Wahid Hasyim 2	Provinsi	1.935,00	5	10	0	0	1.251,78	700,00	0,56	C
191	Jalan Kapt. Soedjono Aj	Kota	3.290,00	3,75	15	0	2	3.032,52	1.234,00	0,41	B
192	Jalan Kapt. Soedjono Aj	Kota	3.290,00	3,75	15	0	2	3.032,52	1.180,00	0,39	B
193	Jalan Sejati	Kota	2.053,00	3,5	7	2	0	1.526,56	956,00	0,63	C
194	Jalan Tengkawang	Kota	577,00	4,5	9	0	0	1.404,44	897,00	0,64	C
195	Jalan Rapak Indah	Provinsi	2.513,00	3,3	13,2	2	1	3.102,00	1.348,00	0,43	B
196	Jalan Rapak Indah	Provinsi	2.513,00	3,3	13,2	2	1	3.102,00	1.504,00	0,48	C
197	Jalan Jakarta	Provinsi	2.916,00	3,3	13,2	1	1	3.008,94	942,00	0,31	B
198	Jalan Jakarta	Provinsi	2.916,00	3,3	13,2	1	1	3.008,94	862,00	0,29	B
199	Jalan K.H.Hasyim Ashari	Kota	472,00	4	8	0	0	1.404,44	912,00	0,65	C
200	Jalan Teratai	Kota	1.124,00	3,7	7,4	0	0	1.404,44	1.026,00	0,73	C
201	Jalan Muh.Said	Kota	4.621,00	3	6	0	0	1.358,64	906,00	0,67	C
202	Jalan Cendana 1	Kota	450,00	3,5	14	0	0	2.235,32	1.089,00	0,49	C
203	Jalan Cendana 2	Kota	900,00	5	10	1,5	0	2.589,70	1.270,00	0,49	C
204	Jalan Sentosa	Kota	1.059,00	2,9	5,8	4	0	2.726,00	1.172,00	0,43	B
205	Jalan Lambung Mangkurat	Kota	1.169,00	4	8	3	0	2.671,48	1.411,00	0,53	C
206	Jalan AM. Sangaji	Kota	1.087,00	3,4	6,8	0	0	1.251,78	827,00	0,66	C
207	Jalan Gatot Subroto	Kota	1.049,00	3	7	2	0	1.526,56	954,00	0,62	C
208	Jalan Damanhuri	Kota	2.631,00	3	6	0	0	1.404,44	790,00	0,56	C
209	Jalan K.H.Samanhudi	Kota	618,00	3,2	6,4	2	0	1.496,03	714,00	0,48	C
210	Jalan Letnan Jend S. Parman	Kota	300,00	3	6	0	0	1.404,44	684,00	0,49	C
211	Jalan Merdeka	Kota	573,00	6	12	2	0	2.371,62	1.137,00	0,48	C
212	Jalan Pelita	Kota	577,00	6,4	12,8	0	0	2.507,92	1.602,00	0,64	C
213	Jalan Mayjend. Sutoyo	Kota	419,00	5,8	11,6	0,5	0	2.181,89	1.384,00	0,63	C
214	Jalan Bukit Alaya	Kota	1.184,00	5,7	11,4	0	0	2.181,89	1.370,00	0,63	C
215	Jalan K.H.Hasan Basri	Kota	426,00	6,3	12,6	1	0	2.507,92	1.548,00	0,62	C
216	Jalan Kemakmuran	Kota	595,00	8	14	2	0	3.045,49	2.305,00	0,76	D
217	Jalan Brigjend. Katamso	Kota	343,00	3,1	6,2	4	0	1.526,56	924,00	0,61	C
218	Jalan Danau Toba	Kota	600,00	3,2	6,4	0	0	2.739,69	681,00	0,25	B
219	Jalan P. Bendahara	Kota	700,00	2,2	4,4	0	0	1.404,44	803,00	0,57	C
220	Jalan Gn. Merbabu	Kota	390,00	2,7	5,4	0	0	1.404,44	1.024,00	0,73	C
221	Jalan Gn. Semeru	Kota	270,00	3,4	6,8	0	0	1.404,44	1.007,00	0,72	C
222	Jalan Gn. Cermai	Kota	200,00	3,2	6,4	0	0	1.358,64	1.010,00	0,74	C
223	Jalan Gn. Arjuna	Kota	750,00	4	8	1,2	0	1.450,23	950,00	0,66	C
224	Jalan Banggeris	Kota	1.200,00	2,6	5,2	1	0	1.404,44	965,00	0,69	C
225	Jalan Meranti	Kota	400,00	7	7	0	0	2.426,14	1.090,00	0,45	C
Rata - Rata								571.625,67	277.040,21	0,48	C

Lampiran V
Evaluasi Renja
Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/Usran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Usran/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode 2024)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu-2023 (Akhir Periode 2024)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Triwulan 1						Triwulan 2						Triwulan 3						Triwulan 4						Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						K		Rp		K		Rp		Sumber Dana		K		Rp		Sumber Dana		K		Rp		Sumber Dana		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2.15.00.0.00.00.2.15.2.2.02.4		Jumlah Perbaikan jalan yang Terelihara dan Terpelihara				7 Unit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Kode Perangkat Daerah/Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Perangkat Daerah/ Usuran/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode 2024)		Realisasi Capaian Kinerja RPMD Kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp		
Urutan/Keterangan T1 :			Kegiatan Peninjauan, pengawasan, penertiban, dan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dan tempat parkir khusus		PAD		2928000000		PAD												
Urutan/Keterangan T2 :			Kegiatan Peninjauan, pengawasan, penertiban, dan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dan tempat parkir khusus		PAD		2928000000		PAD												
Urutan/Keterangan T3 :			Penjagaan dan penerbitan kegiatan parkir serta pendirian yang terus dilakukan secara rutin, rapat kegiatan tentang parkir berlingkaran, rapat terkait kerjasama pengelolaan parkir offstreet dan on street dari perundang veria naga, rapat koordinasi pemanfaatan aset milik pemerintah, rapat ketersediaan parkir di wilayah perkantoran, rapat tindak lanjut kerjasama perbankan, rapat pengelolaan parkir otomoni, rapat SOP Penganggaran bagi hasil Pengelolaan Parkir, Pembelian dan Pemasangan Plang Papan Informasi Perparkiran sejumlah 153 Buah di seluruh samarinda		PAD		2928000000														
Urutan/Keterangan T4 :			Penjagaan dan penerbitan kegiatan parkir serta pendirian yang terus dilakukan secara rutin, rapat kegiatan tentang parkir berlingkaran, rapat terkait kerjasama pengelolaan parkir offstreet dan on street dari perundang veria naga, rapat koordinasi pemanfaatan aset milik pemerintah, rapat ketersediaan parkir di wilayah perkantoran, rapat tindak lanjut		PAD		3017259500														
Faktor Pendukung T1 :			Didukung dana dan alat yang memadai																		
Faktor Penghambat T1 :			Kurang terbnyia masyarakat dalam memarkirkan kendaraan, serta masyarakat yang enggan menggunakan pembayaran parkir non tunai																		
Faktor Pendukung T2 :			Didukung Dana, SDM dan Peralatan yang memadai																		
Faktor Penghambat T2 :			Kurang terbnyia masyarakat dalam memarkirkan kendaraan, serta masyarakat yang enggan menggunakan pembayaran parkir non tunai																		
Faktor Pendukung T3 :			didukung oleh sdm dan peralatan yang memadai																		
Faktor Penghambat T3 :			kurangnya kesadaran masyarakat dalam memarkirkan kendaraannya secara tertib																		
Faktor Pendukung T4 :			Didukung Oleh SDM Dan Peralatan Yang Memadai																		
Faktor Penghambat T4 :			Kurang Terbnyia Masyarakat Dalam Menarkirkan Kendaraan Secara Tertib																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100 96.66
Predikat Kinerja																					ST
2.15.0.0	2	15	2	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6,116,773,138	1,625,000,000	3,500,000										674,561,750			98.4700
0.000.0	2	15	2	2.05																	
1.000.0	2	15	2	2.05	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan	32,428 Unit		8,107										8,107			100
2.15.0.0	2	15	2	2.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	500,000,000	PAD													
0.000.0	2	15	2	2.05																	
1.000.0	2	15	2	2.05	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit		0.25										0.25			100
Urutan/Keterangan T1 :			Data/Laporan Jumlah Kebutuhan Pelaporan Koordinasi/Kerj Sama Pihak Terkait, Pengolahan Data		PAD																
Urutan/Keterangan T2 :			Data/Laporan Jumlah Kebutuhan Pelaporan Koordinasi/Kerja Sama Pihak Terkait, Pengolahan Data		PAD																
Urutan/Keterangan T3 :			Data/Laporan Jumlah Kebutuhan Pelaporan Koordinasi/Kerja Sama Pihak Terkait, Pengolahan Data		PAD																
Urutan/Keterangan T4 :			Data/Laporan Jumlah Kebutuhan Pelaporan Koordinasi/Kerja Sama Pihak Terkait, Pengolahan Data		PAD																
Faktor Pendukung T1 :			Anggaran Yang Memadai																		
Faktor Penghambat T1 :			Anggaran Yang Tidak Memadai																		
Faktor Pendukung T2 :			Data/Laporan Jumlah Kebutuhan Yang Tersedia Anggaran Yang Memadai																		
Faktor Penghambat T2 :			Anggaran Yang Memadai																		
Faktor Pendukung T3 :			Tersedianya Data/Laporan Jumlah Kebutuhan, Koordinasi/Kerja Sama Dengan Pihak Terkait																		
Faktor Penghambat T3 :			Tidak Tersedianya Bporan Jumlah Kebutuhan, Tidak Adanya Koordinasi/Kerja Sama Dengan Pihak Terkait																		
Faktor Pendukung T4 :			Anggaran Yang Memadai, Koordinasi/Kerjasama Yang baik Dengan Pihak Terkait																		
Faktor Penghambat T4 :			Anggaran Yang Kurang Memadai,Koordinasi/Kerjasama Yang Kurang Dengan Pihak Terkait																		
2.15.0.0	2	15	2	2.05	Pengujian Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	11 143,220,000	75,000,000	PAD										33900000 PAD			100 81.3600
0.000.0	2	15	2	2.05																	
1.000.0	2	15	2	2.05	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Orang		2													
Urutan/Keterangan T1 :			Membuat Surat Uluan Ke Pihak terkait																		

Kode (Perangkat Daerah/Usran/Bidang Usran/Program/Kegiatan/Program/Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Usran/ Bidang Usran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output))	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode 2024)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu-2023 (di evaluasi 2024)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)								
						Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp										
						-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4										
	Uraian/Keterangan T2:	Membuat Surat Usulan/ Koordinasi ke Pihak Terkait Proses, Diklat				PAD		75000000																			
	Uraian/Keterangan T3:	Membuat Surat Usulan ke Pihak terkait				PAD		75,000,000																			
	Uraian/Keterangan T4:	Membuat Surat Usulan ke Pihak terkait				PAD		75,000,000																			
	Faktor Pendukung T1:																										
	Faktor Penghambat T1:																										
	Faktor Pendukung T2:																										
	Faktor Penghambat T2:																										
	Faktor Pendukung T3:																										
	Faktor Penghambat T3:																										
	Faktor Pendukung T4:																										
	Faktor Penghambat T4:																										
2.15.00.0.000.0.000.1.000	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		25	483,557,500		300,000,000		PAD		0	PAD		80500000	PAD		60668800	PAD		22768700		295,996,700		779,554,200		100	98.67
2.15.00.0.000.0.000.1.000	4	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				25,000 Dokumen				6.25			6.25				6.25			6.25			25			100	
	Uraian/Keterangan T1:	Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Dan Kelayakan Kendaraan/Pelaporan, Pengolahan Data							PAD		300000000																
	Uraian/Keterangan T2:	Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Dan Kelayakan Kendaraan/Pelaporan, Pengolahan Data							PAD		300000000																
	Uraian/Keterangan T3:	Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Dan Kelayakan Kendaraan/Pelaporan, Pengolahan Data							PAD		300,000,000																
	Uraian/Keterangan T4:	Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Dan Kelayakan Kendaraan/Pelaporan, Pengolahan Data							PAD		300,000,000																
	Faktor Pendukung T1:																										
	Faktor Penghambat T1:																										
	Faktor Pendukung T2:																										
	Faktor Penghambat T2:																										
	Faktor Pendukung T3:																										
	Faktor Penghambat T3:																										
	Faktor Pendukung T4:																										
	Faktor Penghambat T4:																										
2.15.00.0.000.0.000.1.000	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan bermotor		0	50,000,000		50,000,000		PAD		0	PAD		58500000	PAD		34200000	PAD		9950000		50,000,000		50,000,000		100	100
2.15.00.0.000.0.000.1.000	5	Jumlah Laporan/Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4 Laporan				1			1							1		4				100	
	Uraian/Keterangan T1:	Koordinasi/Kerja Sama Dengan Pihak Terkait							PAD		500000000																
	Uraian/Keterangan T2:	Koordinasi/Kerja Sama Dengan Pihak Terkait							PAD		500000000																
	Uraian/Keterangan T3:	Koordinasi/Kerja Sama Dengan Pihak Terkait							PAD		50,000,000																
	Uraian/Keterangan T4:	Koordinasi/Kerja Sama Dengan Pihak Terkait							PAD		50,000,000																
	Faktor Pendukung T1:																										
	Faktor Penghambat T1:																										
	Faktor Pendukung T2:																										
	Faktor Penghambat T2:																										
	Faktor Pendukung T3:																										
	Faktor Penghambat T3:																										
	Faktor Pendukung T4:																										
	Faktor Penghambat T4:																										
2.15.00.0.000.0.000.1.000	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		45	5,489,995,688		700,000,000		PAD		0	PAD		751925000	PAD		519955000	PAD		999613500		695,108,850		6,185,104,488		100	99.03.00
2.15.00.0.000.0.000.1.000	7	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				1 Unit				0.25			0.25							0.25		1				100	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan n/Suho Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output))	Target RPJMD Tahun 2024 (Akhir Periode 2024)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu-2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)
				K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp		
				-1	-1	-1	-1	PAD	300000000	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-4	-4	
	Uraian/Keterangan T2 : Didukung anggaran yang memadai dari SDM yang berkinerja baik																			
	Uraian/Keterangan T3 : target kinerja dengan dukungan anggaran yang memadai dan SDM yang berkinerja baik																			
	Uraian/Keterangan T4 : target kinerja dengan dukungan aggaran yang memadai dan SDM yang berkinerja baik																			
	Faktor Pendukung T1 :																			
	Faktor Penghambat T1 :																			
	Faktor Pendukung T2 :																			
	Faktor Penghambat T2 :																			
	Faktor Pendukung T3 :																			
	Faktor Penghambat T3 :																			
	Faktor Pendukung T4 :																			
	Faktor Penghambat T4 :																			
2.6.00.00.000.1.0000	2.15.2.2.11	Pendidikan Kelapaan dan Sosialisasi Rencana Umum Kabupaten Kota				0	150.000.000	PAD	100000000	PAD	60348250	PAD	38200000	PAD	41450000		149.956.250		149.956.250	100
2.6.00.00.000.2.15.2.2.11	2.15.00.00.000.2.15.2.2.11	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perorotan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota				1	Dokumen		0.25	0.25			0.25			1			100	
	Uraian/Keterangan T1 : Didukung anggaran yang memadai dan SDM yang berkinerja baik							PAD	150000000											
	Uraian/Keterangan T2 : Didukung anggaran yang memadai dan SDM yang berkinerja baik							PAD	150000000											
	Uraian/Keterangan T3 : Didukung anggaran yang memadai dan SDM yang berkinerja baik							PAD	150000000											
	Uraian/Keterangan T4 : Target kinerja tercapai didukung dengan anggaran yang memadai dan SDM yang berkinerja baik							PAD	150000000											
	Faktor Pendukung T1 :																			
	Faktor Penghambat T1 :																			
	Faktor Pendukung T2 :																			
	Faktor Penghambat T2 :																			
	Faktor Pendukung T3 :																			
	Faktor Penghambat T3 :																			
	Faktor Pendukung T4 :																			
	Faktor Penghambat T4 :																			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat Kinerja																				
2.6.00.00.000.1.0000	2.15.2.2.14	Pemberitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				98.054.134	100.000.000		21.969.000		28.225.000		30.848.160		8.800.000		89.842.160		187.896.294	100.89.84
2.6.00.00.000.2.15.2.2.14	2.15.00.00.000.2.15.2.2.14	Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang				4	Laporan		1	1			1		1		4		100	
2.6.00.00.000.3.15.2.2.14	2.15.00.00.000.3.15.2.2.14	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0	100.000.000	PAD	219690000	PAD	28225000	PAD	30848160	PAD	8800000		89.842.160		100.89.84	
2.6.00.00.000.4.15.2.2.14	2.15.00.00.000.4.15.2.2.14	Jumlah laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							1	1			1		1				100	
	Uraian/Keterangan T1 : target kegiatan triwulan 1 sebagai tercapai							PAD	100000000											
	Uraian/Keterangan T2 : Didukung anggaran yang memadai dari SDM yang berkinerja baik							PAD	100000000											
	Uraian/Keterangan T3 : Didukung anggaran yang memadai dan SDM yang berkinerja baik							PAD	100000000											
	Uraian/Keterangan T4 : Didukung anggaran yang memadai dan SDM yang berkinerja baik							PAD	100000000											

[illegible]

Kode Perangkat Daerah/Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Perangkat Daerah/ Usuran/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode 2024)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu-2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)
						K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp		
Anggaran Yang Tidak Memadai, Kurangnya Koordinasi																						
Anggaran Yang Mendukung.																						
Curva Yang Tidak Mendukung, Data Yang Tidak Tersedia																						
Curva Yang Mendukung,Data Yang Tersedia																						
Curva Yang Tidak Mendukung, Data Yang Tidak Tersedia																						
Curva Yang mendukung, Ketersediaan Data,Koordinasi/Kerjasama Pihak Terkait																						
Curva Yang Kurang Mendukung,Ketersediaan Data Yang Kurang Lengkap																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat Kinerja																						
2.15.00.0.0.00.0	2.15.3	2.13	Pembangunan dan Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		4,962,095,431		4,463,000,000		99,516,400		996,023,000		1,548,591,468		1,835,734,763		4,409,865,631		9,371,961,062		100	98.81
2.15.00.0.0.00.0	2.15.3	2.13	Jumlah laporan pembangunan dan pemberian izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau		4 Laporan			1			1		1								100	
2.15.00.0.0.00.0	2.15.3	2.13	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		5,348,286,792		100,000,000	PAD	341,400,000	PAD	328,000	PAD	360,046,681	PAD	313,750		99,753,568		448,040,360		100	99.75
2.15.00.0.0.00.0	2.15.3	2.13	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara		5 Unit				1		2		1		1		5				100	
Usuran/Keterangan T1 : tercapai kegiatan di triwulan pertama karena Kerjasama Tim yang baik																						
Usuran/Keterangan T2 : Anggaran Yang Memadai,Perencanaan,Survey Lapangan,Data Yang tersedia,Kerjasama Tim/ Koordinasi Yang Baik Dengan Pihak Terkait																						
Usuran/Keterangan T3 : Anggaran Yang Memadai,Perencanaan,Survey Lapangan,Data Yang tersedia,Kerjasama Tim/ Koordinasi Yang Baik Dengan Pihak Terkait																						
Usuran/Keterangan T4 : Anggaran Yang Memadai,Perencanaan,Survey Lapangan,Data Yang tersedia,Kerjasama Tim/ Koordinasi Yang Baik Dengan Pihak Terkait																						
Tim yang solid																						
Jaringan Internet																						
Anggaran Yang Memadai,Kerjasama Tim / Koordinasi Yang Baik Dengan Pihak Terkait																						
Anggaran Yang Kurang Memadai,Kurangnya Kerjasama Dan Koordinasi																						
Tim yang solid																						
Jaringan Internet																						
Curva Yang Mendukung, Koordinasi/Kerjasama Yang Baik Dengan Pihak Terkait																						
Curva Yang Tidak Mendukung, Anggaran Yang Kurang Memadai																						
2.15.00.0.0.00.0	2.15.3	2.13	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau		0		3,538,000,000	PAD	275,040,000	PAD	842,950,000	PAD	837,700,000	PAD	178,704,263		3,494,206,263		3,494,206,263		100	98.76
2.15.00.0.0.00.0	2.15.3	2.13	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan		1 Unit						0		0.052			0.25	1				100	
Usuran/Keterangan T1 : Persiapan Dokumen Lejang																						
Usuran/Keterangan T2 : Sedang berjalan proses kegiatan fisik sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan																						
Usuran/Keterangan T3 : Sedang berjalan proses kegiatan fisik sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan																						
Usuran/Keterangan T4 : Sedang berjalan proses kegiatan fisik sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan																						
Anggaran Yang Memadai																						
Anggaran Yang Mendukung																						
Dalam Proses Lejang																						
Manajemen risiko yang terlaksana dengan baik																						
faktor cuaca saat dilapangan																						
Anggaran Yang Memadai,Curva Yang Baik																						
Anggaran Yang Tidak Memadai, Curva Yang Kurang Baik,Keterbatasan waktu																						
Anggaran Yang Memadai																						
Anggaran Yang Kurang Memadai																						
2.15.00.0.0.00.0	2.15.3	2.13	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau		5,768,878,000		750,000,000	PAD	578,718,000	PAD	239,210,000	PAD	652,117,000	PAD	700,000		1,489,887,800		1,489,887,800		100	98.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**DISHUB
SAMARINDA**
Bergerak Menuju Kota Peradaban



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SAMARINDA**

JL. MT. Haryono No. 01 Samarinda 75124
Telp 0541 - 748537
Homepage: <https://dishub.samarinda.go.id>
Email : dishub@samarinda.go.id